



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
JI. CUT NYAK DIEN NO. 3 PEKANBARU

TIM PENYUSUN LKJIP DISDIK 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

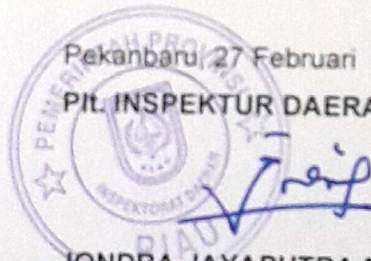
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

PIL. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan laporan akuntabilitas kinerja untuk periode Renstra tahun 2025-2026. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2025, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2025-2026.

Tahun 2025 Dinas Pendidikan melaksanakan empat program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang.



Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2025. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**



H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	18
1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	19
1.7 PERMASALAHAN UTAMA	25
1.8 TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2026.....	28
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2 REALISASI ANGGARAN	82
BAB IV PENUTUP	85
4.1 KESIMPULAN.....	85
4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS	86



DAFTAR TABEL

1.1	Kondisi ASN berdasarkan Jabatan	21
1.2	Klasifikasi ASN menurut Pendidikan.....	21
1.3	Rekapitulasi Aset/ Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Prov. Riau.....	23
1.4	Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Prov. Riau	24
1.5	Rekapitulasi Aset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau	24
1.6	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	25
2.1	Tujuan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	28
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2025.....	30
3.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah	32
3.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025.....	33
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah.....	35
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Nasional	36
3.5	Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir dengan Standar Nasional Rata-rata Lama Sekolah	37
3.6	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah.....	40
3.7	Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025.....	40
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan target Akhir Renstra Perangkat Daerah	43
3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata lama Sekolah tahun ini dengan Nasional.....	44
3.10	Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir dengan Standar Nasional Harapan Lama Sekolah	45
3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.12	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APK.....	51
3.13	Perbandingan APK SM sederajat Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	51
3.14	APK SM sederajat Tahun 2025.....	53



3.15	APK SM sederajat Tahun 2024.....	54
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini Dengan Nasional.....	56
3.18	Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir dengan Realisasi Nasional	56 57
3.19	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat.....	58
3.20	APM SM sederajat Tahun 2025	59
3.21	APM SM sederajat Tahun 2024	60
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah.....	62
3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini Dengan Target Tahun Akhir Renstra.....	62
3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini Dengan Nasional	63
3.25	Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir dengan Realisasi Nasional	63
3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
3.27	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	69
3.28	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun 2025.....	70
3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini Dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah.....	71
3.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
3.31	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	76
3.32	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025	77
3.33	Realisasi Capaian Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau 5 Tahun Terakhir.....	77
3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini Dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah	78



3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	81
3.36 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	83
4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	85



DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau	19
-----	--	----



DAFTAR GRAFIK

1.1	Kondisi ASN Berdasarkan Jabatan.....	18
1.2	Klasifikasi ASN Menurut Pendidikan.....	22
3.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025.....	33
3.2	Realiasi Rata rata Lama Sekolah 5 Tahun Terakhir	37
3.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025.....	41
3.4	Realiasi Harapan Lama Sekolah 5 Tahun Terakhir	45
3.5	APK SM sederajat Tahun 2025.....	53
3.6	Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir.....	57
3.7	APM SM sederajat Tahun 2025.....	60
3.8	Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Sekretaris Daerah Nomor Kpts. 159/IV/2023 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan.



1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25).
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4).
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.



2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2025.
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang.
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7).

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta pelaksanaan urusan dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana alokasi khusus yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan



Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, mengendalikan kebijakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrative.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Dinas, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Sekretariat;
 - Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan;
 - Mengkoordinasikan perumusan, pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - Mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, dan pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
 - Mengkoordinasikan pengendalian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;



- Mengkoordinasikan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas;
- Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
- Mengkoordinasikan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- Mengkoordinasikan manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
- Mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;
- Mengkoordinasikan pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ PD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Inovasi PD;
- Pengkajian verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;



- Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan baik Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di lingkungan Dinas, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - Penyelenggaraan, pengelolaan dan menyediakan layanan administratif urusan rumah tangga di lingkungan Dinas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas:
- Membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Umum serta antar Instansi Pemerintah;
 - Melaksanakan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian dan Umum sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - Melaksanakan penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan di lingkup Kepegawaian dan Umum;



- Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
 - Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah hukum kepegawaian, dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - Penyelenggaraan pemberian penghargaan dan cinderamata peserta didik berprestasi akademik dan non akademik;
 - Melaksanakan penerimaan, dan pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - Pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan penataan pendistribusian, mutasi, promosi, guru dan tenaga kependidikan, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta urusan kepegawaian lainnya;
 - Menyiapkan kebutuhan bahan pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:
- Membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta antar Instansi Pemerintah;



- Pelaksanaan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- Penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemeriksaan, merapatkan realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas, Cabang serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan di lingkungan Dinas;
- Penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Penyelenggaraan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Pengkajian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- Pelaksanaan penyusunan laporan hasil verifikasi dan pembukuan keuangan;
- Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan pengelolaan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- Pelaksanaan dan penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan, pegawai setiap bulannya dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);



- Pelaksanaan dan penyiapan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.
8. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Atas.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
 - Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - Penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;



- Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- Pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;



- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:
- Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;



- Penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta pendidik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;



- Penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di sekolah pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Penyelenggaraan kegiatan bina karakter dan Pendidikan Vokasi serta revitalisasi di era industri pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:



- Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik bidang pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa,



Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan, peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyelenggaraan asesmen autisme, terapi serta transisi untuk persiapan mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler;
- Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan



- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
 - c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. -14- 9. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah
11. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
- a. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan operasional pembinaan dan peningkatan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi;
 - Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Peningkatan mutu serta karakter pendidik;
 - Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;



- Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, peningkatan mutu dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal budaya melayu Riau baik Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan dan pelaksanaan pembinaan serta peningkatan karir Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan assesment Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyusunan perumusan dan pelaksanaan pemberian penghargaan serta memberikan pelayanan perlindungan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah



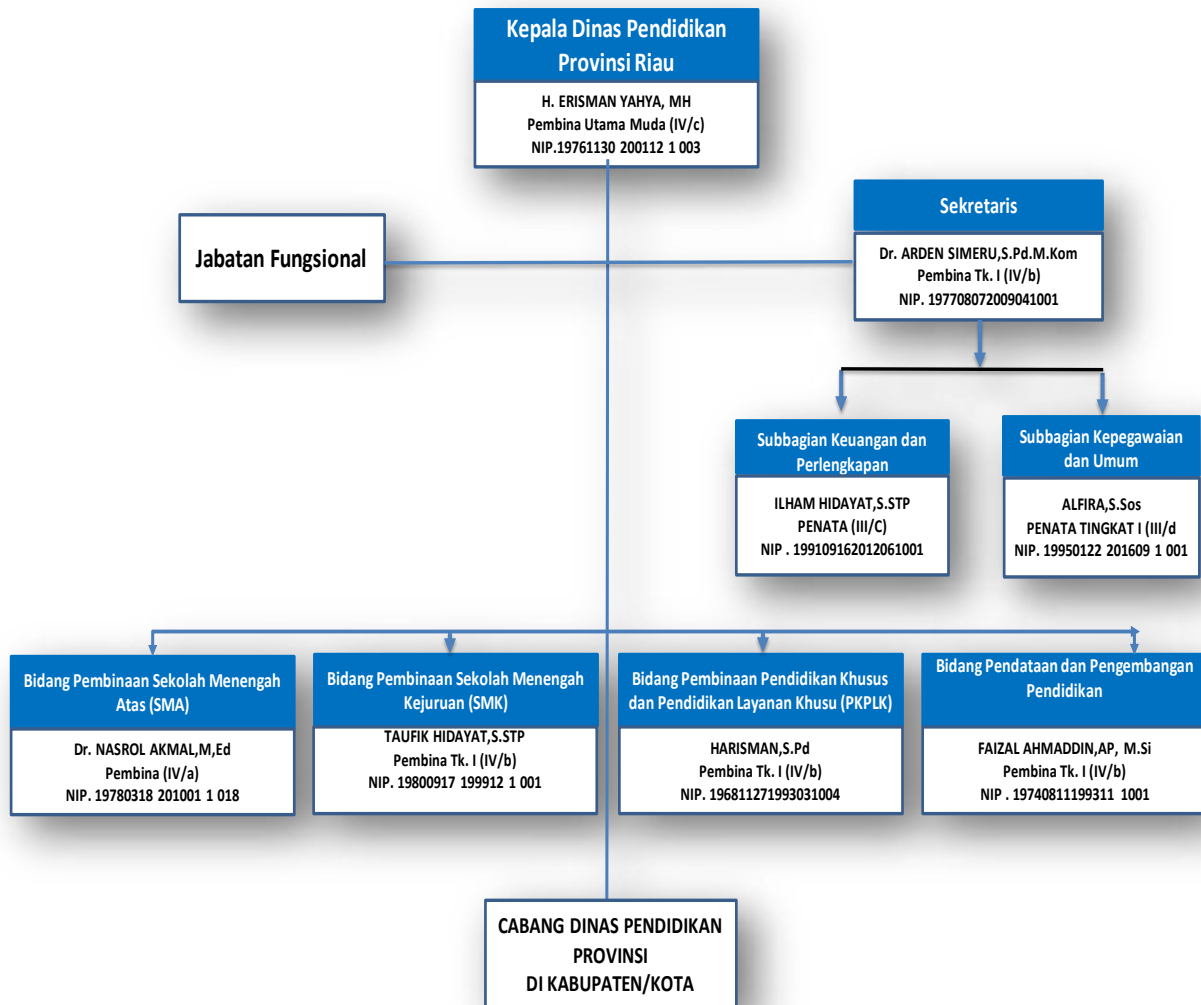
- Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsi.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU



1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.6.1 Eksternal

Aspek strategis eksternal Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat mencakup berbagai faktor yang berada di luar organisasi namun dapat mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Tantangan aspek strategis eksternal Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan pendidikan,



seperti kurikulum, anggaran, dan standar pendidikan.

2. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara belajar dan mengajar, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan.

3. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi.

4. Kerjasama dengan Stakeholder

Kerjasama dengan stakeholder seperti orang tua, masyarakat, industri, dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

5. Perubahan Sosial dan Ekonomi

Perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan pendidikan.

6. Regulasi dan Standar

Regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan internasional.

Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam menghadapi aspek strategis eksternal dapat membantu:

1. Mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin dihadapi.
2. Mengembangkan strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan sumber daya dan anggaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

1.6.2 Internal

1.6.2.1 Sumber Daya Manusia

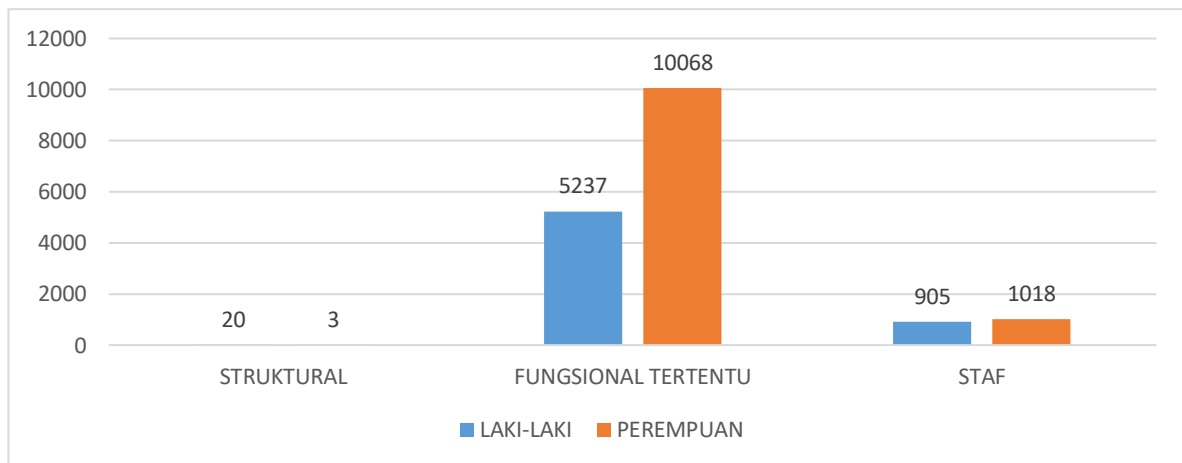
Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada.

Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 14.816 Pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi ASN berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ASN BERDASARKAN							
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV				
1	Laki-laki	0	1	9	10	20	5.237	905	6.162
2	Perempuan	0	0	0	3	3	10.068	1.018	11.089
TOTAL ASN						23	15.305	1.923	17.251

Grafik 1.1
Kondisi ASN Berdasarkan Jabatan



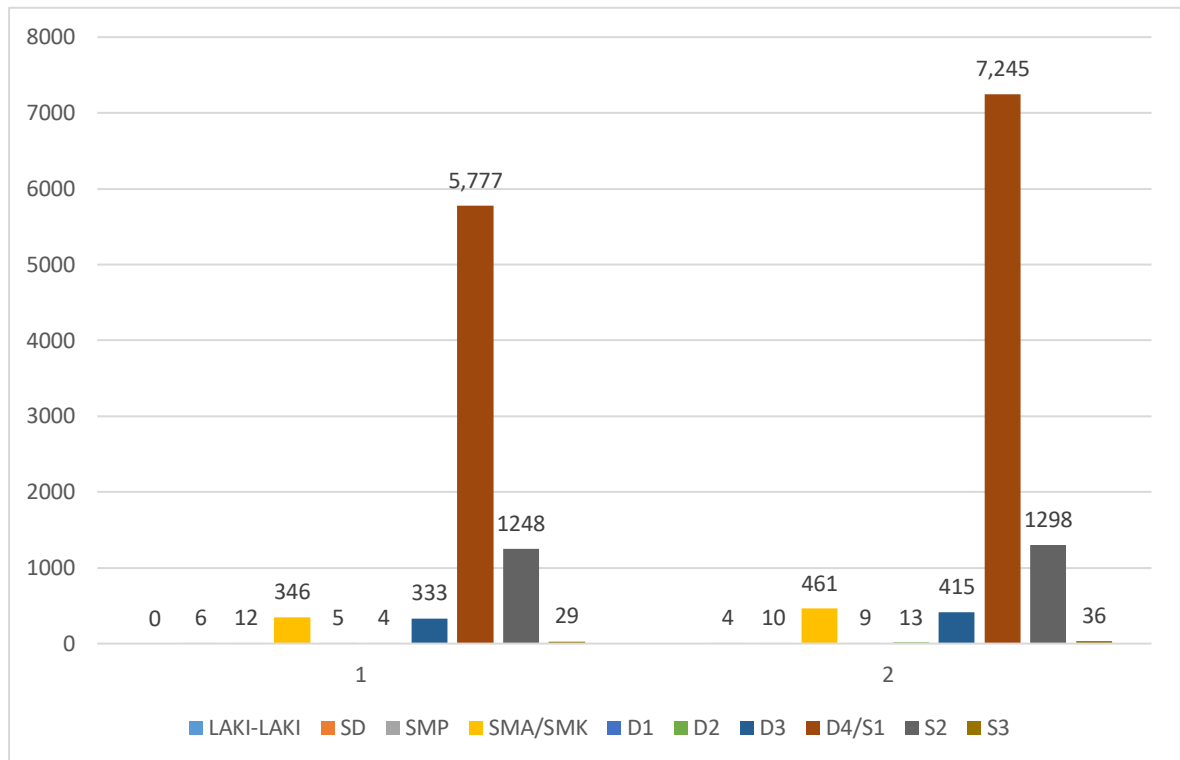
sumber data: (Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 17.251 orang, dan Jabatan Struktural sebanyak 23 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi ASN menurut Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ASN BERDASARKAN									
		TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA/SMK	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	6	12	346	5	4	333	5.777	1248	29	7.760
2	PEREMPUAN	4	10	461	9	13	415	7.245	1298	36	9.491
TOTAL		10	22	807	14	17	748	13.022	2.546	65	17.251

Grafik 1.2
Klasifikasi ASN Menurut Pendidikan



(sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 13.022 orang dan SMA/SMK Sederajat berjumlah 807 orang. Jika dilihat dari ASN yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 1.334 orang dari seluruh ASN Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

1.6.2.2 Sarana dan Prasarana

1) Aset Tanah / Sarana Prasarana

Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

N O	Uraian	Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	600	2009	Jl. Cemara Pekanbaru	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550	1982	Jl. Suka Terus	Gedung Graha / Mes Wisma Handayani
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.360	1999	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	Dinas Pendidikan
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.740	2009	Jl. Sukaterus No. 3 Pekanbaru	BTP dan BPKB
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.305	1995	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru	Gedung Guru
6	Tanah Lapangan Tenis	2.730	1982	Jl. Suka Terus Kec. Jadirejo Sukajadi Pekanbaru	SMA Handayani
7	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	-	2007	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru	Gedung Autis
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.385	2004	Kec. Marpoyan Damai, Kel. Wonorejo Pekanbaru	Gedung Sekolah SMP
9	Tanah Kosong Lainnya	2.370	1977	JL. DR. Sutomo	

sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 9 lokasi dari aset tersebut yang memiliki Luar terbesar adalah Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan Luas 30.040 (M²) dan yang terkecil Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dengan Luas 600

(M²). Sedangkan aset dengan tahun pengadaan terlama yaitu Tanah Kosong di Jln. Dr. Sutomo Pekanbaru.

2) Prasarana / Barang

Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.4
Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Operational	10
2	Mobil Operasional Mini Bus	1
3	Mobil Operasional Double Cabin	3
4	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	23
5	Komputer Unit	189
6	Peralatan Komputer	48
7	Printer	160
8	Mesin Fotocopy	7

sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2025

3) Aset Satuan Pendidikan

Rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.5
Rekapitulasi Aset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	KAB/KOTA	SMA			SMK			SLB		
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML
1	Kab. Bengkalis	35	13	48	19	10	29	2	5	7
2	Kab. Indragiri Hilir	26	18	44	9	10	19	1	1	2
3	Kab. Indragiri Hulu	24	6	30	12	6	18	1	0	1
4	Kab. Kampar	44	11	55	16	17	33	4	0	4
5	Kab. Kepulauan Meranti	17	8	25	2	5	7	1	3	4
6	Kab. Kuantan Singingi	21	0	21	12	2	14	1	0	1
7	Kab. Pelalawan	20	7	27	10	11	21	2	0	2
8	Kab. Rokan Hilir	39	23	62	6	19	25	1	1	2
9	Kab. Rokan Hulu	31	7	38	23	15	38	1	2	3
10	Kab. Siak	34	4	38	13	14	27	1	2	3
11	Kota Dumai	7	8	15	7	11	18	1	5	6
12	Kota Pekanbaru	21	50	71	10	52	62	2	13	15
	JUMLAH	319	155	474	139	172	311	18	32	50

sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2025

Data tabel tersebut terlihat jumlah Sekolah SMA Terbanyak ada di Kota Pekanbaru sejumlah 71 sekolah, Kabupaten Rokan Hilir sejumlah 62 Sekolah diikuti Kabupaten Kampar sejumlah 55 Sekolah. Jumlah SMK terbanyak ada di Kota Pekanbaru sejumlah 62 Sekolah di ikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu 38 Sekolah.

1.7 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang ditemukan tentu perlu menjadi bahan antisipasi agar dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dapat menjadi lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan terdapat pada table 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya akses pendidikan	Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus
			Masih rendahnya kualitas ruang kelas
		Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan	Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik
			Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah
2.	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan	Masih rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
			Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus



		Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri
			Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi
			Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri

1.8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Hasil dari evaluasi AKIP untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan nilai sebesar **74,85** dan Tingkat akuntabilitas kinerja "**BB**". namun demikian ada beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading).
2. Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).
3. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline.
4. Melaksanakan monitoring kinerja terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang di perjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) Laporan monev per triwulan memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;



6. Meningkatkan kualitas Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja di periode berikutnya;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dari hal tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan telah Menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
2. Dinas Pendidikan telah menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline untuk penyusunan Renstra periode 2025-2029
3. Dinas Pendidikan menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja di periode berikutnya tahun 2025
4. Dinas Pendidikan telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil melalui surat edaran yang terstruktur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN

Untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Rencana Strategis yang di gunakan adalah Rencana Strategis antara Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -	
			2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umum > 25 tahun (Tahun)	9,50	9,59
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,54	13,66
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat (Persen)	67,55	68,05
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat (Persen)	90,99	91,54
	Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Berakreditasi A (Persen)	42,88	43,48
	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80	75,00



2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ada didalam perjanjian kinerja mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi:

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas Pendidikan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode.

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	1.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >25 Tahun	9,42-9,48
		2.	Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1.	APM SM Sederajat	68,20
		2.	APK SM Sederajat	92,45
3	Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		45,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74,80

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	1.362.015.189.404	APBD
2	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	158.163.325	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	16.564.704.092	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	1.658.300.304.491	APBD

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak mengalami perubahan target dari awal penentuan besaran target karena realisasi kinerja tahun 2024 telah melampaui target Renstra Tahun 2025-2026. Sesuai arahan Tim Penilai SAKIP KEMENPAN RB Penentuan target Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 ditentukan sesuai Realisasi Tahun sebelumnya jika telah tercapai target dapat dinaikkan untuk tahun berikutnya. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau hanya dikarenakan pergantian pejabat yang menandatangani Perjanjian Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan jumlah 6 (enam) Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. SASARAN 1 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

Capaian kinerja pada Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata Tahun 2025 dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. Capaian sasaran perindikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dengan rumus sebagai berikut dihitung berdasarkan rumus:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Capaian kinerja pada Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	Rata-Rata Lama Sekolah	9,42-9,48	9,55	100,74	9,35-9,40	9,43	100,32

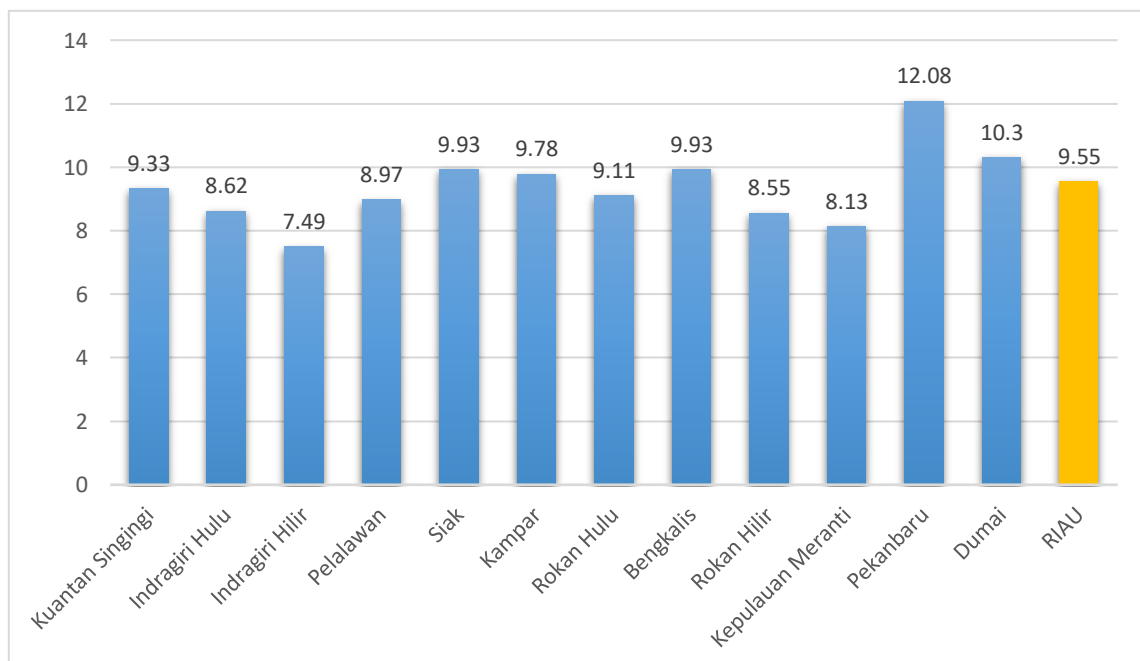
Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata pada Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,74 persen dengan realisasi 9,55 dari target 9,48 sedangkan capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,32 persen dengan realisasi 9,43 dengan target 9,40. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan RLS dari 9,43 tahun pada 2024 menjadi 9,55 tahun pada 2025 mengindikasikan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan standar pendidikan menengah 12 tahun (setara SMA/ sederajat), capaian RLS tersebut masih menunjukkan bahwa secara rata-rata masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Hal ini menjadi tantangan pembangunan pendidikan ke depan. Berikut tabel realisasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah perkabupaten/kota pada Tahun 2025:

Tabel 3.2
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025
1	Kuantan Singingi	9,33
2	Indragiri Hulu	8,62
3	Indragiri Hilir	7,49
4	Pelalawan	8,97
5	Siak	9,93
6	Kampar	9,78
7	Rokan Hulu	9,11
8	Bengkalis	9,93
9	Rokan Hilir	8,55
10	Kepulauan Meranti	8,13
11	Pekanbaru	12,08
12	Dumai	10,3
RIAU		9,55

sumber data: BPS Provinsi Riau

Grafik 3.1
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025



Dari tabel 3.2 dan Grafik 3.1 RLS dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Disparitas Wilayah

a. Ketimpangan Tertinggi dan Terendah

- RLS tertinggi: Pekanbaru (12,08 tahun)
- RLS terendah: Indragiri Hilir (7,49 tahun)
- Gap ketimpangan: 4,59 tahun

Disparitas ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan wilayah dengan karakteristik geografis sulit atau berbasis kepulauan/perdesaan.

b. Karakteristik Wilayah

Wilayah dengan capaian tinggi seperti Pekanbaru dan Dumai umumnya memiliki:

- Infrastruktur pendidikan lebih lengkap
- Konsentrasi sekolah menengah dan perguruan tinggi
- Tingkat urbanisasi tinggi
- Kondisi ekonomi masyarakat lebih baik

Sebaliknya, wilayah dengan RLS rendah umumnya menghadapi:

- Akses pendidikan menengah terbatas
- Faktor ekonomi masyarakat
- Kondisi geografis (kepulauan/daerah terpencil)
- Angka putus sekolah/Anak Tidak Sekolah relatif lebih tinggi

2. Analisis Posisi Kinerja terhadap Target Pembangunan

Secara provinsi, RLS 9,55 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk baru menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP). Artinya, secara agregat Provinsi Riau masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendidikan 12 tahun. Hanya Pekanbaru yang telah melampaui 12 tahun (setara rata-rata lulusan SMA), sementara sebagian besar kabupaten masih berada pada kisaran 8–9 tahun.

Hal ini menunjukkan:

1. Perlu akselerasi peningkatan partisipasi pendidikan menengah atas.
2. Intervensi khusus pada kabupaten dengan RLS < 9 tahun.

3. Strategi afirmatif untuk wilayah dengan karakteristik geografis sulit.

Perbandingan realisasi kinerja Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan
Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	-9,35 9,40	9,43	100,32	9,59	9,43	98,33

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah, Realisasi RLS Tahun 2025 sebesar 9,43 tahun, melampaui target maksimal (9,40) dengan capaian 100,32% dengan Interpretasi : Kinerja indikator tergolong sangat baik karena melampaui target tahunan, terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat usia dewasa dan terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat usia dewasa dan Kebijakan pendidikan sebelumnya memberikan dampak nyata terhadap outcome jangka panjang. LS 9,43 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP) dan sebagian masuk jenjang SMA. Target akhir Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 9,59 tahun, sementara realisasi 2025 masih berada pada 9,43 tahun. Gap terhadap Target Renstra: $9,59 - 9,43 = 0,16$ tahun Capaian terhadap target akhir Renstra baru mencapai 98,33%. Artinya: Meskipun target tahunan terlampaui dan Masih terdapat jarak signifikan untuk mencapai target strategis jangka menengah. Dengan tren peningkatan rata-rata $\pm 0,09 - 0,12$ per tahun, target 9,59 masih realistis

namun memerlukan akselerasi. Jika dibandingkan tren beberapa tahun terakhir, peningkatan RLS menunjukkan pola stabil dan akseleratif. Namun untuk mencapai tambahan 0,16 tahun dalam satu tahun (2025–2026), dibutuhkan peningkatan yang relatif lebih besar dibanding kenaikan rata-rata tahunan sebelumnya. Hal ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih fokus dan intensif.

Perbandingan Realisasi kinerja Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2025 adalah:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini Dengan Nasional

Uraian	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025
Provinsi Riau	9,55
Nasional (Indonesia)	9,07

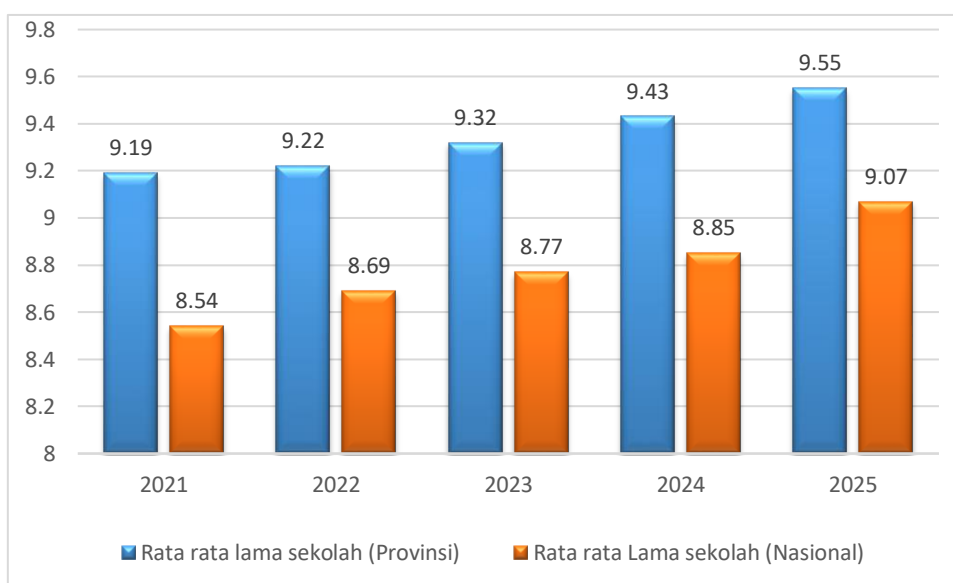
Sumber data: BPS Indonesia

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Nasional, Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 9,55 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun. Selisih antara Provinsi Riau dan Nasional sebesar $9,55 - 9,07 = 0,48$ tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Riau menempuh pendidikan hampir setengah tahun lebih lama dibandingkan rata-rata nasional. Capaian RLS Provinsi Riau yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di daerah telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan Akses pendidikan dasar dan menengah relatif lebih baik dibanding rata-rata nasional, Program intervensi pendidikan berjalan efektif, dan Tingkat partisipasi pendidikan menengah relatif lebih tinggi dibanding beberapa wilayah lain di Indonesia. Berikut tabel dan grafik trend capaian Rata rata Lama Sekolah Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir dengan Standar Nasional
Rata Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata Lama Sekolah (Provinsi)	9,19	9,22	9,32	9,43	9,55
Rata Lama Sekolah (Nasional)	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Grafik 3.2
Realiasi Rata rata Lama Sekolah 5 Tahun Terakhir



Dari tabel 3.5 dan Grafik 3.2 dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Tren (Trend Analysis)

Selama periode 2021–2025, RLS Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun.

Kenaikan Tahunan Provinsi:

- 2021 → 2022: +0,03
- 2022 → 2023: +0,10
- 2023 → 2024: +0,11
- 2024 → 2025: +0,12

Total kenaikan 2021–2025: $9,55 - 9,19 = 0,36$ tahun

Terlihat bahwa laju peningkatan semakin akseleratif dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kebijakan dan efektivitas

program pendidikan menengah. Sebagai pembanding, kenaikan nasional dalam periode yang sama adalah: $9,07 - 8,54 = 0,53$ tahun. Walaupun secara absolut kenaikan nasional lebih besar, hal ini disebabkan oleh baseline nasional yang lebih rendah. Secara posisi relatif, Provinsi Riau tetap konsisten berada di atas nasional.

2. Analisis Perbandingan Relatif terhadap Nasional Selisih RLS Provinsi dan Nasional

Tahun	Selisih
2021	0,65
2022	0,53
2023	0,55
2024	0,58
2025	0,48

Terlihat bahwa Selisih tertinggi terjadi pada 2021 (0,65 tahun) dan Selisih terkecil terjadi pada 2025 (0,48 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Riau masih di atas rata-rata nasional, terjadi kecenderungan penyempitangap karena pertumbuhan nasional relatif lebih cepat. Interpretasi: Provinsi Riau memiliki kinerja baik secara absolut. Namun, akselerasi nasional perlu menjadi perhatian agar daerah tidak kehilangan daya saing relatif.

3. Analisis Kinerja terhadap Sasaran Strategis

Indikator RLS mencerminkan keberhasilan sasaran: “Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata” Peningkatan 0,36 tahun dalam 5 tahun menunjukkan bahwa Akses pendidikan menengah meningkat, penurunan angka putus sekolah relatif terkendali dan Program bantuan pendidikan dan afirmasi berjalan efektif. Namun demikian, capaian 9,55 tahun masih menunjukkan bahwa secara rata-rata masyarakat belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun (SMA/ sederajat). Artinya, sasaran jangka panjang belum tercapai secara optimal.

4. Analisis Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan tren peningkatan yang stabil dan akseleratif, kebijakan pendidikan dapat dikategorikan:

✓ **Efektif**

Karena indikator menunjukkan peningkatan konsisten tanpa stagnasi.

✓ **Berkelanjutan**

Karena tidak terjadi penurunan selama periode 5 tahun.

✓ **Adaptif**

Karena peningkatan terbesar terjadi pasca pemulihan periode pandemi, yang menunjukkan daya tahan sistem pendidikan.

RLS merupakan komponen utama dalam penghitungan IPM dimensi pendidikan. Peningkatan 0,36 tahun dalam 5 tahun memberikan kontribusi positif terhadap Peningkatan IPM daerah, Daya saing tenaga kerja, Produktivitas ekonomi dan Pengurangan kemiskinan structural. Namun, tanpa percepatan peningkatan pendidikan menengah, transformasi ekonomi berbasis SDM akan berjalan lambat.

1.2 Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas pada masa mendatang, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap. Sumber Data BPS dengan rumus sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLSt_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Capaian kinerja pada Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Meratadengan indikator Harapan Lama Sekolah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6

Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2		4	5	6	4	5	6
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54	13,44	99,93	13,44-13,60	13,42	99,85

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata pada Indikator Harapan Lama Sekolah adalah pada Tahun 2024 Realisasi 13,42 tahun dengan capaian 99,85%. Kinerja sangat baik (mendekati target), namun belum mencapai batas bawah target. Untuk Tahun 2025 Realisasi meningkat menjadi 13,44 tahun dengan capaian 99,93%. Terdapat kenaikan 0,02 tahun dibanding 2024 (± 7 hari masa sekolah). Indikator stabil dan mendekati target ($\geq 99\%$), menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menjaga akses dan keberlanjutan pendidikan. Namun laju peningkatan sangat moderat, mengindikasikan potensi stagnasi. HLS 13,44 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun diproyeksikan menempuh pendidikan hingga awal pendidikan tinggi (semester awal). Artinya: Akses pendidikan dasar dan menengah relatif terjaga, tantangan utama bergeser pada retensi hingga SMA/SMK dan transisi ke perguruan tinggi dan uang peningkatan semakin sempit karena indikator telah berada pada level tinggi (diminishing return). Berikut tabel realisasi indikator Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2025:

Tabel 3.7

Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025

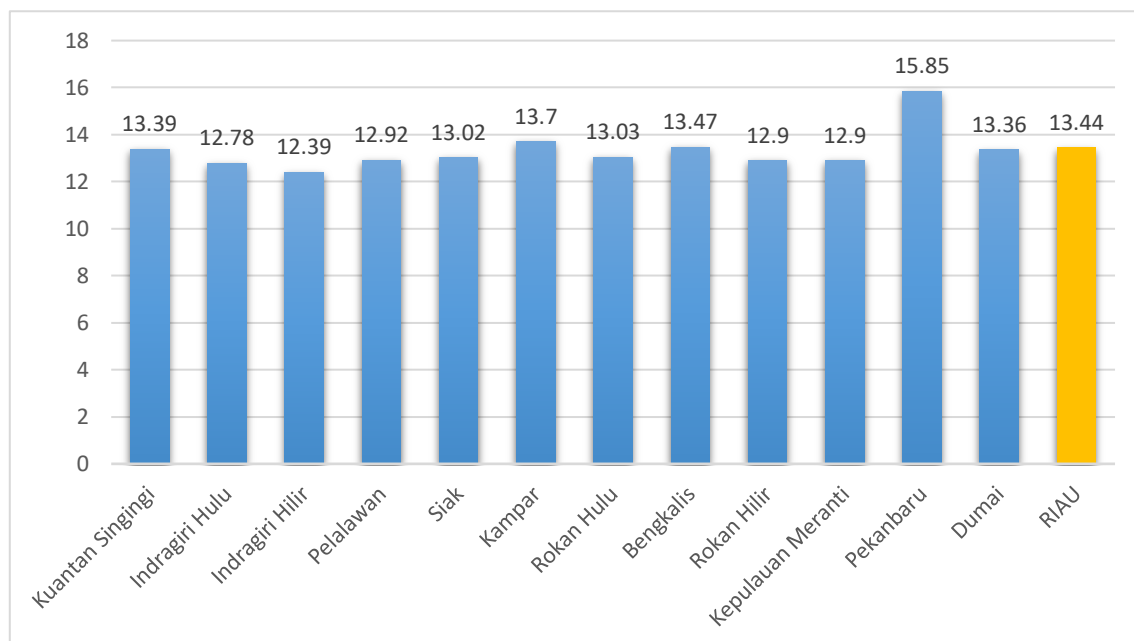
No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah Tahun 2024
1	Kuantan Singingi	13,39
2	Indragiri Hulu	12,78
3	Indragiri Hilir	12,39
4	Pelalawan	12,92
5	Siak	13,02
6	Kampar	13,7



7	Rokan Hulu	13,03
8	Bengkalis	13,47
No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah Tahun 2024
9	Rokan Hilir	12,9
10	Kepulauan Meranti	12,9
11	Pekanbaru	15,85
12	Dumai	13,36
	RIAU	13,44

Sumber data: BPS Provinsi Riau

Grafik 3.3
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025



Dari tabel 3.6 dan grafik 3.2 dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif dan Disparitas Wilayah

A. Peringkat dan Klasifikasi

Kelompok HLS Tinggi (>13,40) adalah Pekanbaru: 15,85, Kampar: 13,70, Bengkalis: 13,47 dan Kuantan Singingi: 13,39 (mendekati rata-rata provinsi). Kelompok Menengah (13,00 – 13,40) adalah Dumai: 13,36, Rokan Hulu: 13,03 dan Siak: 13,02. Kelompok Rendah (<13,00) adalah Pelalawan: 12,92, Rokan Hilir: 12,90, Kepulauan Meranti: 12,90, Indragiri Hulu: 12,78 dan Indragiri Hilir: 12,39.

B. Ketimpangan Antar Daerah

Nilai tertinggi: Pekanbaru (15,85), Nilai terendah: Indragiri Hilir (12,39) dan Gap maksimum: 3,46 tahun. Disparitas 3,46 tahun menunjukkan ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan yang cukup signifikan antar wilayah. Tanpa Kota Pekanbaru, rata-rata kabupaten cenderung berada di kisaran 12,8–13,4 tahun.

2. Analisis Substantif dan Faktor Determinan

A. Konsentrasi Fasilitas Pendidikan

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki Akses SMA/SMK lebih luas, Konsentrasi perguruan tinggi, Infrastruktur pendidikan lebih baik, dan Tingkat urbanisasi tinggi. Hal ini menjelaskan lonjakan HLS hingga 15,85.

B. Faktor Geografis dan Sosial Ekonomi

Kabupaten dengan HLS rendah umumnya memiliki Wilayah geografis luas dan terpencil, kses transportasi terbatas, Tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi, Anak usia sekolah yang masuk dunia kerja lebih dini, Indragiri Hilir (12,39) menunjukkan tantangan serius pada transisi pendidikan menengah dan keberlanjutan ke jenjang lebih tinggi.

C. Ketersediaan dan Distribusi Sekolah Menengah

HLS sangat sensitif terhadap yaitu Rasio SMA/SMK terhadap jumlah penduduk, Daya tampung pendidikan menengah dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun. Wilayah dengan HLS di bawah 13 tahun mengindikasikan potensi rendahnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi.

D. Analisis Kontribusi terhadap IPM

HLS merupakan komponen utama dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan HLS akan Mendorong kenaikan IPM daerah: Meningkatkan kualitas SDM, Mendukung transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan Disparitas HLS berpotensi menciptakan ketimpangan IPM kabupaten/kota.

E. Analisis Risiko Kebijakan

Jika disparitas tidak ditangani maka Ketimpangan kualitas SDM antar wilayah semakin lebar, Urbanisasi pendidikan meningkat (migrasi ke Pekanbaru), Kabupaten tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalan dan Ketimpangan

ekonomi regional meningkat. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan Prioritas intervensi pada Kab/Kota Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti.

Perbandingan realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja
Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan
Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54	13,44	99,93	13,66	13,44	98,39

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah, Realisasi Tahun 2025 sebesar 13,44 tahun, sedikit di bawah batas bawah target (13,45). Terdapat Deviasi: -0,01 tahun dan Capaian: 99,93%. Interpretasi Kinerja: Secara kuantitatif belum mencapai 100%, namun selisih sangat kecil (0,01), Secara substantif menunjukkan stabilitas partisipasi pendidikan dan Tidak terdapat penurunan signifikan, tetapi juga belum terjadi akselerasi. Dengan HLS 13,44, anak usia 7 tahun di Riau diproyeksikan bersekolah hingga awal pendidikan tinggi. Realisasi Tahun 2025 sebesar 13,44 tahun, sedikit di bawah batas bawah target (13,45). Terdapat Deviasi: -0,01 tahun dan Capaian: 99,93%. Interpretasi Kinerja: Secara kuantitatif belum mencapai 100%, namun selisih sangat kecil (0,01), Secara substantif menunjukkan stabilitas partisipasi pendidikan dan Tidak terdapat penurunan signifikan, tetapi juga belum terjadi akselerasi. Dengan HLS 13,44, anak usia 7 tahun di Riau diproyeksikan bersekolah hingga awal pendidikan tinggi. Terhadap Target Akhir Renstra 2026 ada Gap Strategis yaitu Target 2026: 13,66, Realisasi 2025: 13,44 Gap: 0,22 tahun. Capaian terhadap target akhir: 98,39%. Artinya

diperlukan tambahan peningkatan 0,22 tahun dalam satu tahun terakhir periode Renstra. Laju Pertumbuhan yang Diperlukan Jika rata-rata kenaikan tahunan sebelumnya berkisar 0,05–0,10 tahun, maka: Untuk mencapai 13,66 dibutuhkan kenaikan dua kali lipat dari tren normal Tanpa intervensi tambahan, target berpotensi tidak tercapai. Dengan demikian, target masih realistis tetapi membutuhkan akselerasi kebijakan.

Perbandingan realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2025 adalah:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini Dengan Nasional

Uraian	Harapan Lama Sekolah Tahun 2025
Provinsi Riau	13,44
Nasional (Indonesia)	13,30

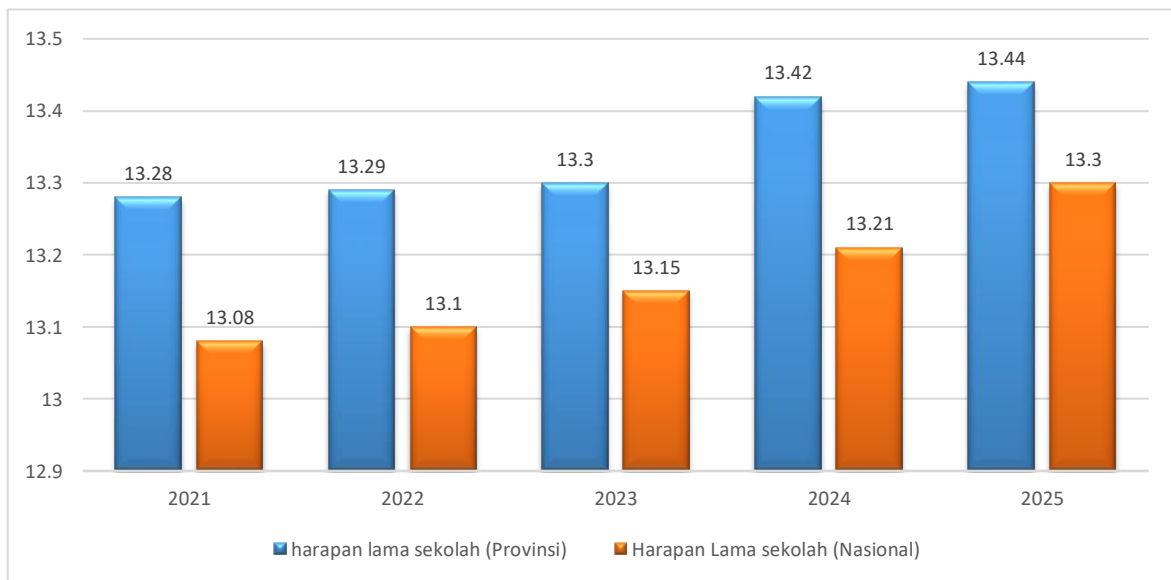
Sumber data: BPS Indonesia

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Nilai HLS Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 13,44 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,30 tahun. Selisih: $13,44 - 13,30 = 0,14$ tahun. Artinya, anak usia 7 tahun di Riau secara rata-rata memiliki peluang menempuh pendidikan 0,14 tahun lebih lama dibanding rata-rata nasional. Secara kinerja makro, hal ini menunjukkan bahwa posisi Provinsi Riau berada di atas capaian nasional, yang mengindikasikan daya dukung sistem pendidikan relatif baik. HLS sebesar 13,44 tahun mengandung makna: Anak di Riau berpotensi menyelesaikan pendidikan hingga SMA dan memasuki semester awal pendidikan tinggi. Akses pendidikan dasar dan menengah relatif terjaga dan Partisipasi sekolah usia 7–18 tahun cukup baik. Dibandingkan nasional, keunggulan 0,14 tahun menunjukkan: Sistem pendidikan provinsi berjalan efektif. Dukungan kebijakan pendidikan daerah memberikan dampak positif dan Infrastruktur pendidikan relatif memadai. HLS merupakan salah satu komponen utama dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keunggulan Riau atas nasional berdampak pada: Kontribusi positif terhadap IPM Provinsi, Peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Daya saing tenaga kerja yang lebih baik. Dan Daya tarik investasi berbasis SDM. Namun peningkatan HLS harus diiringi peningkatan mutu pembelajaran agar tidak hanya kuantitas lama sekolah, tetapi juga kualitas pendidikan.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir dengan Standar Nasional
Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah (Provinsi)	13,28	13,29	13,3	13,42	13,44
Harapan Lama Sekolah (Nasional)	13,08	13,1	13,15	13,21	13,30

Grafik 3.4
Realiasi Harapan Lama Sekolah 5 Tahun Terakhir



Dari tabel 3.8 dan Grafik 3.5 dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Tren Kinerja Provinsi

Selama periode 2021–2025, HLS Provinsi Riau meningkat dari 13,28 menjadi 13,44. Total kenaikan: +0,16 tahun dalam 5 tahun dan Rata-rata kenaikan tahunan: $\pm 0,04$ tahun. Interpretasi yaitu Terjadi tren peningkatan yang konsisten dan stabil, Tidak terdapat penurunan tahunan (trend positif berkelanjutan dan Lonjakan terbesar terjadi pada 2024 (+0,12), menunjukkan adanya akselerasi kebijakan. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan awal pendidikan tinggi.

2. Analisis Perbandingan dengan Nasional

Tahun	Selisih
2021	+0,20
2022	+0,19
2023	+0,15
2024	+0,21
2025	+0,14

Selama lima tahun terakhir, HLS Riau selalu berada di atas rata-rata nasional. Analisis perbandingan adalah Riau konsisten unggul dari nasional, Margin keunggulan relatif stabil, meskipun sedikit menyempit pada 2025 dan Nasional mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Riau unggul, laju peningkatan nasional juga kompetitif.

3. Analisis Laju Pertumbuhan

A. Pertumbuhan Riau:

- 2021–2023: kenaikan sangat gradual (+0,01 per tahun).
- 2024: lonjakan signifikan (+0,12).
- 2025: kembali melambat (+0,02).

B. Pertumbuhan Nasional:

- Peningkatan relatif stabil tiap tahun.
- Total kenaikan 2021–2025: +0,22 tahun (lebih tinggi dari Riau).

Implikasi nya Secara agregat, nasional tumbuh lebih cepat (+0,22) dibanding Riau (+0,16). Ini menyebabkan selisih keunggulan Riau cenderung menyempit.

4. Analisis Substantif Indikator

HLS bersifat proyektif dan sangat dipengaruhi oleh:

1. Angka Partisipasi Sekolah usia 7–18 tahun.
2. Transisi SMP ke SMA/SMK.
3. Partisipasi pendidikan tinggi.
4. Tingkat putus sekolah.

Stabilitas HLS Riau menunjukkan:

- Sistem pendidikan dasar dan menengah relatif terjaga.
- Namun akselerasi belum konsisten setiap tahun.

5. Analisis Dampak terhadap IPM

Karena HLS merupakan komponen dimensi pendidikan dalam IPM:

- Peningkatan 0,16 berkontribusi positif terhadap IPM Provinsi.
- Namun pertumbuhan yang lebih cepat di tingkat nasional menuntut peningkatan daya saing daerah.

Jika tren melambat, posisi relatif Riau dapat tergerus.

6. Analisis Permasalahan Strategis

Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika HLS:

1. Disparitas antar kabupaten/kota.
2. Konsentrasi pendidikan tinggi di perkotaan.
3. Anak usia 16–18 tahun yang masuk dunia kerja dini.
4. Keterbatasan daya tampung SMA/SMK di wilayah tertentu.
5. Faktor ekonomi keluarga.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Meningkatkan infrastruktur pembangunan secara merata (jalan dan jembatan) di Provinsi Riau dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk peningkatan akses ke sekolah, melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta merehabilitasi ruang kelas yang rusak, Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan, Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau



1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak pernah sekolah serta Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah
 2. Terdapat Disparitas RLS dan HLS antar kabupaten/kota dan Konsentrasi pendidikan tinggi di perkotaan
 3. Kurangnya minat masyarakat mengikuti Pendidikan Kesetaraan
 4. Akses Pendidikan bagi masyarakat yang jauh di Wilayah dengan karakteristik geografis khusus memiliki RLS di bawah rata-rata provinsi
 5. Tingginya biaya Pendidikan
 6. Faktor ekonomi dan sosial budaya masih mempengaruhi keberlanjutan pendidikan.
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau.
1. Peningkatan Kualitas Pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif
 2. Meningkatkan Daya Tampung Sekolah melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta merehabilitasi ruang kelas yang rusak.
 3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan untuk Sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) yang merupakan kewenangan dari Pemkab/Pemkot.
 4. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
 5. Mengurangi biaya personal siswa dengan Pemberian Bantuan Biaya Personal ke Lembaga Pendidikan SMA, SMK dan SLB melalui Dana BOSDA serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 6. Memberikan Beasiswa Siswa SMA sederajat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Provinsi Riau
 7. Meningkatkan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan ketersediaan data Pendidikan yang akurat dan berkualitas.

8. Meningkatkan peran serta stakeholders pada pembangunan bidang pendidikan.
9. Dalam menghadapi keterbatasan Anggaran Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Riau meningkatkan upaya dalam meningkatkan Anggaran yang bersumber dari APBN
10. Integrasi kebijakan pendidikan dengan penanggulangan kemiskinan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Meratadan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	100,74	86,76	13,98
	Harapan Lama Sekolah	99,26		12,50

Dari tabel 3.9 di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja: 100,74% (melampaui target), Penyerapan Anggaran: 86,76% dan Tingkat Efisiensi: 13,98%. Artinya: Target kinerja tercapai bahkan melebihi. Anggaran tidak terserap penuh dan Terdapat selisih kinerja positif sebesar 13,98%. Kondisi ini menunjukkan: Penggunaan anggaran relatif efisien, Outcome tercapai tanpa menghabiskan seluruh pagu dan Perencanaan program cukup tepat sasaran. Secara manajerial, ini mencerminkan Optimalisasi belanja Pendidikan, Efektivitas pelaksanaan program dan Pengendalian anggaran berjalan baik. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah sisa anggaran disebabkan oleh Efisiensi riil (penghematan harga, optimalisasi kegiatan) dan Atau adanya kegiatan yang tidak terealisasi penuh. Jika karena penghematan operasional, maka ini menunjukkan efisiensi nyata. Jika karena kegiatan tertunda, maka perlu evaluasi perencanaan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)



2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)
3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

Dampak Peningkatan kinerja Sasaran Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan RLS meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan HLS menjamin peluang pendidikan generasi masa depan.
3. Kedua indikator berkontribusi signifikan terhadap IPM dan daya saing daerah.
4. Dampaknya tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga ekonomi dan sosial.
5. Kinerja indikator ini menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau.

2. SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan Tahun 2025 dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam meningkatkan akses Pendidikan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat. Capaian sasaran per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Indikator APK SM sederajat dapat digunakan untuk ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan SM Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan dengan indikator APK sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APK

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pendidikan	APK SM Sederajat	92,45	86,63	93,70	92,40	92,10	99,67

Dari tabel 3.10 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan pada Indikator APK SM sederajat Realisasi APK Tahun 2024 sebesar 92,10% dan 2025: sebesar 86,63%. Terjadi penurunan 5,47 poin pada tahun 2025. Tingkat Capaian Target 2024: 99,67% (hampir memenuhi target) namun pada 2025: 93,70% (turun 5,97 poin capaian). Walaupun target 2025 hanya naik tipis (92,40 → 92,45), realisasi justru turun cukup dalam, sehingga jarak terhadap target semakin melebar. Penurunan APK SMA/SMK/MA Sederajat Tahun 2025 sebesar 5,47 poin dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh peningkatan signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebesar 7,82%. Kenaikan tersebut diduga berasal dari faktor migrasi masuk serta pemutakhiran basis data kependudukan, sehingga pertumbuhan jumlah peserta didik belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan denominator. Apabila jumlah penduduk usia sekolah dinormalisasi pada level Tahun 2024, maka APK Tahun 2025 secara simulatif mencapai 93,38%, melampaui target 92%. Dengan demikian, penurunan APK lebih bersifat statistik-demografis dibanding penurunan akses layanan pendidikan secara substantif. Berikut adalah Tabel 3.11 Perbandingan APK SM Sederajat Tahun 2024 dan Tahun 2025:

Tabel 3.13
Perbandingan APK SM sederajat Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Penduduk usia 16–18	Jumlah Siswa	APK Provinsi
2024	377.350	347.525	92,10%
2025	406.831	352.432	86,63%

Sumber data: Buku APK APM Kemendikbudristek

Analisis Makro Untuk analisis penurunan Capaian APK jika dilihat dari data tabel 3.11 adalah:

1. Jumlah penduduk usia 16–18 meningkat 7,82%
2. Jumlah siswa hanya meningkat 1,41%
3. APK turun 5,47 poin (92,10% → 86,63%)

Artinya, pertumbuhan peserta didik tidak mampu mengimbangi lonjakan penduduk usia sekolah.

Faktor Penyebab Penurunan APK Tahun 2025

1. Faktor Demografis

Lonjakan populasi usia 16–18 tidak diimbangi kapasitas daya tampung. Daya tampung belum optimal dan Tidak semua lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Penurunan APK SMA/SMK/MA Sederajat Tahun 2025 sebesar 5,47 poin dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh peningkatan signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebesar 7,82%. Kenaikan tersebut diduga berasal dari faktor migrasi masuk serta pemutakhiran basis data kependudukan, sehingga pertumbuhan jumlah peserta didik belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan denominator. Apabila jumlah penduduk usia sekolah dinormalisasi pada level Tahun 2024, maka APK Tahun 2025 secara simulatif mencapai 93,38%, melampaui target 92%. Dengan demikian, penurunan APK lebih bersifat statistik-demografis dibanding penurunan akses layanan pendidikan secara substantif.

2. Faktor Ekonomi dan Sosial

- Kenaikan biaya hidup
- Anak bekerja membantu keluarga
- Biaya pendidikan tidak langsung (transportasi, seragam, dll.)
- Pernikahan dini
- Migrasi

3. Faktor Geografis

Wilayah kepulauan dan terpencil (Meranti, Inhil)

4. Faktor Sosial

- Pernikahan dini
- Migrasi keluarga

5. Validasi Data

Perubahan metode pendataan atau sinkronisasi Dapodik–Badan Pusat Statistik atau Disdukcapil

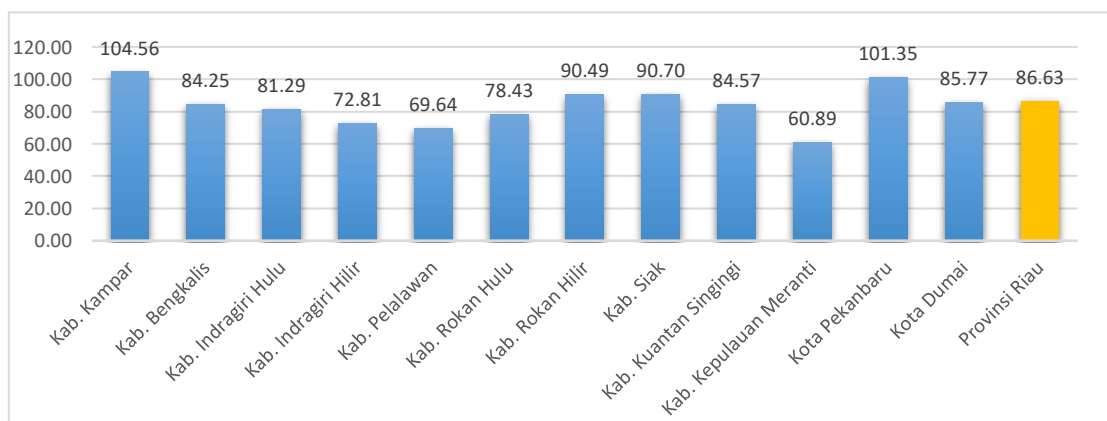
Berikut tabel realisasi indikator APK SM sederajat pada Tahun 2025:

Tabel 3.14
APK SM sederajat Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	40.741	42.597	104,56
2	Kab. Bengkalis	40.565	34.176	84,25
3	Kab. Indragiri Hulu	28.265	22.978	81,29
4	Kab. Indragiri Hilir	40.060	29.167	72,81
5	Kab. Pelalawan	27.621	19.234	69,64
6	Kab. Rokan Hulu	37.709	29.576	78,43
7	Kab. Rokan Hilir	38.501	34.839	90,49
8	Kab. Siak	30.524	27.684	90,70
9	Kab. Kuantan Singingi	20.315	17.180	84,57
10	Kab. Kepulauan Meranti	13.944	8.491	60,89
11	Kota Pekanbaru	67.591	68.503	101,35
12	Kota Dumai	20.995	18.007	85,77
	Provinsi Riau	406.831	352.432	86,63

Sumber data: Buku APK APM Kemendikbudristek

Grafik 3.5
APK SM sederajat Tahun 2025



Tabel 3.15
APK SM sederajat Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	47.301	41.212	87,13
2	Kab. Bengkalis	37.856	33.508	88,51
3	Kab. Indragiri Hulu	23.292	22.592	96,99
4	Kab. Indragiri Hilir	41.310	30.106	72,88
5	Kab. Pelalawan	19.851	18.615	93,77
6	Kab. Rokan Hulu	28.742	28.756	100,05
7	Kab. Rokan Hilir	45.783	35.413	77,35
8	Kab. Siak	26.107	26.522	101,59
9	Kab. Kuantan Singingi	16.803	15.863	94,41
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.978	8.435	76,84
11	Kota Pekanbaru	62.932	69.149	109,88
12	Kota Dumai	16.395	17.354	105,85
	Provinsi Riau	377.350	347.525	92,10

Dari tabel 3.12 dan tabel 3.13 serta Grafik 3.3 dapat diketahui penurunan APK lebih bersifat statistik-demografis dibanding penurunan akses layanan pendidikan secara substantif. Pertumbuhan penduduk usia 16–18 tahun pada data 2025 dipengaruhi oleh perpindahan penduduk (migrasi) dari provinsi lain. Berikut analisis komprehensifnya:

1. Kemungkinan Faktor Migrasi dalam Peningkatan Penduduk Usia 16–18 Tahun
Kenaikan penduduk usia 16–18 tahun dari:

- 2024: 377.350
- 2025: 406.831

Naik sekitar 29.481 jiwa ($\pm 7,8\%$)

Secara demografis, kenaikan hampir 8% dalam satu tahun relatif tinggi untuk kelompok umur sempit (3 tahun cohort). Secara teori, kenaikan ini bisa berasal dari:

- Pertumbuhan Alamiah (Birth Cohort Effect)
- Anak yang lahir 16–18 tahun lalu memang lebih besar jumlahnya.
- Namun lonjakan sebesar 7–8% dalam satu tahun biasanya tidak sepenuhnya disebabkan faktor kelahiran.
- Perbaikan Basis Data Kependudukan
- Sinkronisasi data Dukcapil



- Pembersihan data ganda
- Perubahan metode estimasi
- Migrasi Masuk (In-Migration)

Ini kemungkinan yang rasional, terutama jika terjadi pada wilayah tertentu seperti Kota Pekanbaru, Kab. Kampar dan Kawasan industri / perkebunan / migas

2. Pola Migrasi yang Umum Terjadi di Riau

Provinsi Riau secara historis menerima migrasi dari:

- Provinsi Sumatera Barat
- Sumatera Utara
- Jambi
- Jawa (migrasi tenaga kerja/perkebunan)

Jika keluarga berpindah karena pekerjaan:

- Anak usia SMA ikut pindah
- Masuk dalam data penduduk usia sekolah

3. Wilayah yang Paling Mungkin Terdampak Migrasi

Dilihat dari lonjakan penduduk 16–18 tahun 2024 → 2025:

Wilayah kab/kota	2024	2025	Kenaikan
Pelalawan	19.851	27.621	+7.770
Rokan Hulu	28.742	37.709	+8.967
Dumai	16.395	20.995	+4.600
Kep. Meranti	10.978	13.944	+2.966
Kuantan Singingi	16.803	20.315	+3.512

Kenaikan 15–30% dalam satu tahun pada cohort umur sempit sangat tidak lazim secara demografis alami. Indikasi kuat adalah Migrasi tenaga kerja Perpindahan keluarga, sektor industri/Perkebunan dan Perbaikan data kependudukan.

Perbandingan realisasi kinerja APK SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pendidikan	APK SM Sederajat	92,45	86,63	93,70	91,54	86,63	94,64

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Capaian APK SMA Sederajat Tahun 2025 sebesar 86,63% atau 93,70% dari target menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah telah menjangkau sebagian besar penduduk usia 16–18 tahun, namun masih terdapat gap 5,82 poin terhadap target tahunan. Terhadap target akhir Renstra 2026 sebesar 91,54%, capaian saat ini telah mencapai 94,64%, sehingga diperlukan akselerasi peningkatan partisipasi sekitar 4,91 poin atau setara ±20 ribu siswa tambahan untuk memastikan pencapaian target akhir periode.

Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini dengan Target Nasional (Tahun 2025) adalah sebagai berikut:

APK SM sederajat tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2025 adalah:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini Dengan Nasional

Uraian	APK SM sederajat Tahun 2025
Provinsi Riau	86,63
Nasional (Indonesia)	97,36

Sumber data : Buku APK APM Kemendikbud

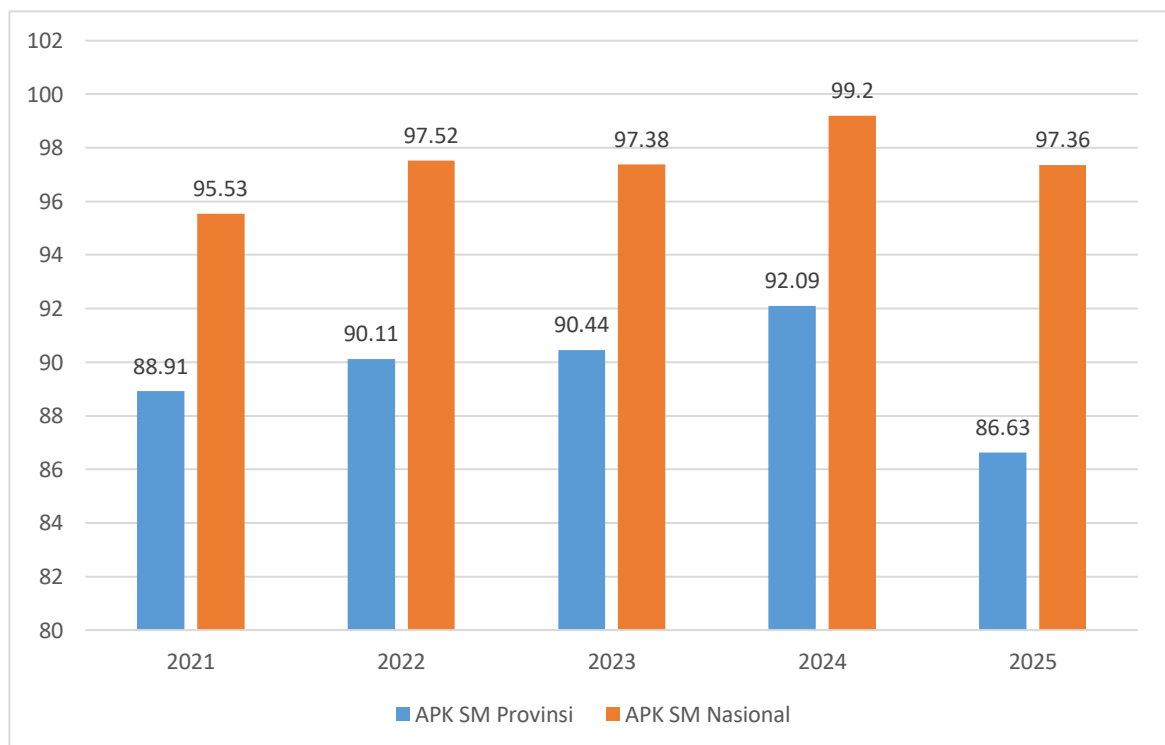
Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Capaian APK SMA Sederajat Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 86,63% masih berada 10,73 poin di bawah rata-rata nasional sebesar 97,36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk usia 16–18 tahun telah mengakses pendidikan menengah, masih terdapat ruang perbaikan dalam

pemerataan dan perluasan akses, khususnya pada wilayah terpencil dan kelompok rentan. Untuk menyamai capaian nasional, diperlukan peningkatan partisipasi sekitar 43 ribu siswa tambahan. Riau tertinggal signifikan dibanding nasional. Gap sebesar 10,73 poin memerlukan akselerasi kebijakan, Tantangan utama: demografi, geografis, dan ekonomi dan Intervensi berbasis wilayah menjadi kunci percepatan.

Tabel 3.18
Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir
dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
APK SM Sedereajat (Provinsi)	88,91	90,11	90,44	92,09	86,63
APK SM Sedereajat (Nasional)	95,53	97,52	97,38	99,2	97,36

Grafik 3.6
Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir



Dari tabel 3.16 dan Grafik 3.7 dapat dilihat bahwa Realisasi APK SM Sederajat Provinsi menunjukkan tren peningkatan pada periode 2021–2024, namun mengalami penurunan pada Tahun 2025 menjadi 86,63% yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah. Dibandingkan dengan capaian nasional, masih terdapat selisih sebesar 10,73 poin pada Tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekspansi daya tampung dan peningkatan partisipasi pendidikan menengah.

2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SM sederajat}}{\text{jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan dengan indikator APM SM sederajat sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SM Sederajat	68,20	64,59	94,71	68,00	68,17	100,25

Dari tabel 3.17 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan pada Indikator APM SM sederajat pada Tahun 2025 adalah sebesar 94,71 persen dengan realisasi 64,59 dari target 68,20 sedangkan capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,25 persen dengan realisasi 68,17 dengan target 68,00. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar 3,58 persen

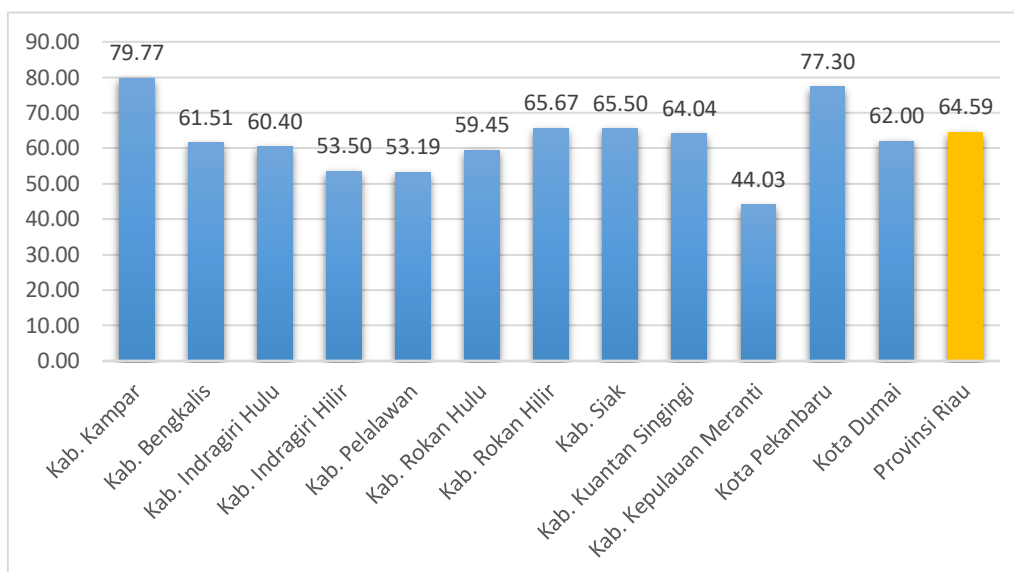
dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024. Penurunan APM SMA Sederajat Tahun 2025 sebesar 3,58 poin lebih disebabkan oleh peningkatan signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebesar 7,8%, sementara jumlah peserta didik tepat usia relatif stabil. Dengan demikian, secara absolut tidak terjadi penurunan jumlah siswa, namun secara persentase indikator terdampak oleh pertumbuhan denominator. Hal ini memerlukan strategi peningkatan daya tampung dan afirmasi wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi.. Berikut tabel realisasi indikator APM SM sederajat pada Tahun 2025:

Tabel 3.20
APM SM sederajat Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun	APM %
1	Kab. Kampar	40.741	32.501	79,77
2	Kab. Bengkalis	40.565	24.951	61,51
3	Kab. Indragiri Hulu	28.265	17.072	60,40
4	Kab. Indragiri Hilir	40.060	21.431	53,50
5	Kab. Pelalawan	27.621	14.691	53,19
6	Kab. Rokan Hulu	37.709	22.419	59,45
7	Kab. Rokan Hilir	38.501	25.282	65,67
8	Kab. Siak	30.524	19.994	65,50
9	Kab. Kuantan Singingi	20.315	13.009	64,04
10	Kab. Kepulauan Meranti	13.944	6.139	44,03
11	Kota Pekanbaru	67.591	52.249	77,30
12	Kota Dumai	20.995	13.017	62,00
	Provinsi Riau	406.831	262.755	64,59

Sumber data: Buku APK APM Kemendikbudristek

Grafik: 3.7
APM SM sederajat Tahun 2025



Tabel 3.21
APM SM sederajat Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun	APM %
1	Kab. Kampar	47.301	31.288	66,15
2	Kab. Bengkalis	37.856	24.409	64,48
3	Kab. Indragiri Hulu	23.292	16.628	71,39
4	Kab. Indragiri Hilir	41.310	21.645	52,40
5	Kab. Pelalawan	19.851	14.003	70,54
6	Kab. Rokan Hulu	28.742	21.472	74,71
7	Kab. Rokan Hilir	45.783	25.326	55,32
8	Kab. Siak	26.107	19.458	74,53
9	Kab. Kuantan Singingi	16.803	11.950	71,12
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.978	6.027	54,90
11	Kota Pekanbaru	62.932	52.544	83,49
12	Kota Dumai	16.395	12.478	76,11
	Provinsi Riau	377.350	257.228	68,17

Sumber data: Buku APK APM Kemendikbudristek

Dari tabel 3.18, Tabel 3.19 dan Grafik 3.7 dapat diketahui Penurunan APM SMA Sederajat Tahun 2025 dipengaruhi oleh lonjakan jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebesar 7,81% yang diduga berasal dari efek gelombang kelahiran, migrasi masuk usia produktif, serta pemuakhiran data kependudukan. Kenaikan jumlah peserta didik sebesar 2,15% belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut, sehingga secara persentase indikator mengalami penurunan. Analisis komprehensifnya yaitu Interpretasi Makro nya bahwa Penduduk usia 16–18 naik 29.481 jiwa (7,81%), Jumlah siswa tepat usia naik 5.527 siswa (2,15%), APM turun 3,58 poin walaupun jumlah siswa meningkat, kenaikan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah, sehingga persentase APM mengalami penurunan. Secara absolut akses meningkat dan Secara persentase terjadi tekanan demografis. Penurunan APM bukan karena penurunan peserta didik, tetapi karena:

1. Lonjakan penduduk usia 16–18 tahun

Lonjakan penduduk usia 16–18 tahun kemungkinan disebabkan oleh kombinasi Efek gelombang kelahiran, Migrasi masuk usia produktif, Perbaikan pencatatan kependudukan dan Revisi proyeksi BPS

2. Pertumbuhan siswa tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk

3. Kemungkinan faktor migrasi masuk usia produktif

Provinsi Riau memiliki karakteristik: Wilayah industri dan Perkebunan, Mobilitas tenaga kerja tinggi, Urbanisasi ke Pekanbaru dan daerah industry. Kemungkinan terjadi: Migrasi keluarga dengan anak usia SMA, Perpindahan domisili tercatat di Dukcapil, Perubahan status kependudukan dari luar provinsi. Jika penduduk bertambah tetapi anak belum masuk sekolah setempat → APM turun

Jika penduduk 2025 tetap seperti 2024: $262.755 \div 377.350 \times 100 = 69,63\%$.

Secara kapasitas pendidikan, sebenarnya terjadi peningkatan partisipasi, namun tereduksi oleh pertumbuhan demografi.

Perbandingan realisasi kinerja APM SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM Sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SM Sederajat	68,20	64,59	94,71	68,05	64,59	94,92

Dari tabel 3.20 dapat dilihat bahwa Realisasi APM SM Sederajat Tahun 2025 sebesar 64,59% dari target 68,20% dengan capaian 94,71%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 68,05%, tingkat capaian mencapai 94,92%. Penurunan persentase dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang cukup signifikan. Secara umum indikator masih berada dalam jalur pencapaian, namun memerlukan percepatan melalui strategi peningkatan partisipasi tepat usia. Kinerja belum optimal namun masih dalam kategori baik dan Penurunan tidak mencerminkan kegagalan program.

Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat Tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2025 adalah

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini Dengan Target Tahun Akhir Renstra

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SM Sederajat	68,20	64,59	94,71	68,05	64,59	94,92

Dari tabel 3.21 dapat dilihat bahwa Realisasi APM SMA Sederajat Tahun 2025 sebesar 64,59% mencapai 94,71% dari target tahun berjalan dan 94,92% terhadap target akhir Renstra 2026. Meskipun belum mencapai target, capaian berada pada kategori baik. Kesenjangan yang masih tersisa sebesar 3,46 poin dipengaruhi oleh peningkatan

signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan peserta didik. Oleh karena itu, pada tahun terakhir Renstra diperlukan percepatan melalui peningkatan daya tampung dan penjangkauan anak tidak sekolah.

Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat Tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2025 adalah:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja
APM SM sederajat tahun ini Dengan Nasional

Uraian	APM sederajat Tahun 2025
Provinsi Riau	64,59
Nasional (Indonesia)	70,74

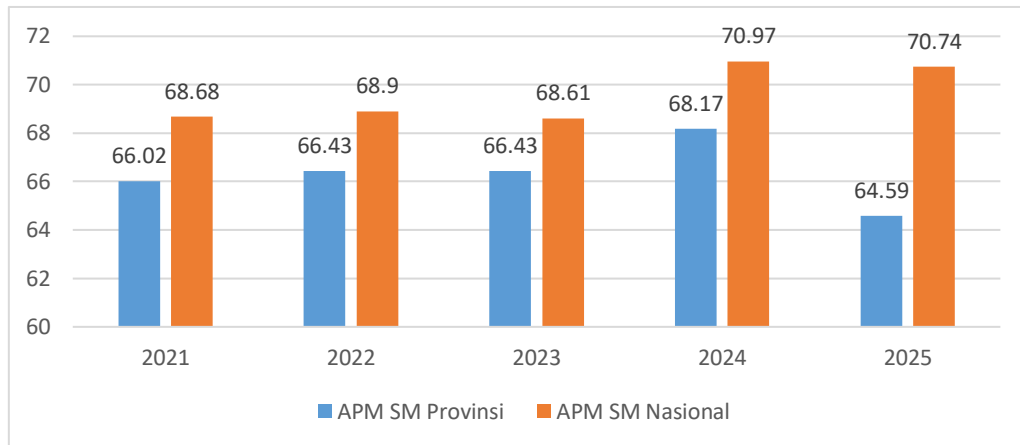
Sumber data : Buku APK APM Indonesia

Dari tabel 3.22 dapat dilihat bahwa Realisasi APM SMA Sederajat Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 64,59% masih berada 6,15 poin di bawah rata-rata nasional sebesar 70,74%. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan peserta didik. Secara absolut jumlah siswa meningkat, namun secara persentase indikator mengalami tekanan akibat pertumbuhan demografis serta ketimpangan akses antarwilayah.

Tabel 3.25
Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir
dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
APM SM Sedereajat (Provinsi)	66,02	66,43	66,43	68,17	64,59
APM SM Sedereajat (Nasional)	68,68	68,9	68,61	70,97	70,74

Grafik 3.8
Realisasi APK SM sederajat 5 Tahun Terakhir



Dari tabel 3.23 dan Grafik 3.8 dapat dilihat bahwa Dalam periode 2021–2024, capaian APM SMA Sederajat Provinsi relatif stabil dengan selisih 2–3 poin di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2025 terjadi pelebaran kesenjangan menjadi 6,15 poin akibat peningkatan signifikan jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan peserta didik. Penurunan ini bersifat struktural-demografis, bukan penurunan jumlah siswa, melainkan akibat lonjakan jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tidak sepenuhnya diimbangi peningkatan peserta pendidikan anak tidak sekolah guna mempersempit kesenjangan dengan capaian nasional. Kondisi ini memerlukan penguatan strategi peningkatan daya tampung serta penjangkauan anak tidak sekolah guna mempersempit kesenjangan dengan capaian nasional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah Meningkatkan Daya Tampung dengan , Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan serta Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM)



dan komunitas adat terpencil (KAT), Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

- b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau
 1. Penurunan APK dan APM Tahun 2026 bukan disebabkan oleh penurunan jumlah peserta didik, melainkan oleh peningkatan signifikan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak sepenuhnya diimbangi pertumbuhan peserta didik. Secara absolut jumlah siswa tetap/meningkat, namun secara persentase indikator mengalami tekanan akibat pertumbuhan demografis. penurunan indikator bersifat statistik-demografis, bukan akibat penurunan layanan pendidikan. Penurunan indikator terjadi karena Lonjakan cohort usia SMA (efek gelombang kelahiran), Migrasi masuk keluarga usia produktif (Provinsi Riau memiliki karakteristik: Wilayah industri dan Perkebunan, Mobilitas tenaga kerja tinggi, Urbanisasi ke Pekanbaru dan daerah industry. Kemungkinan terjadi: Migrasi keluarga dengan anak usia SMA, Perpindahan domisili tercatat di Dukcapil, Perubahan status kependudukan dari luar provinsi. Jika penduduk bertambah tetapi anak belum masuk sekolah setempat maka APK dan APM turun), Pemutakhiran data kependudukan yang meningkatkan jumlah penduduk terdata dan Revisi atau sinkronisasi data BPS/Dukcapil
 2. Kurangnya daya tampung Sekolah Menengah untuk lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke Pendidikan Menengah
 3. Belum tepatnya/alih fungsi sarana prasarana pendidikan di sekolah
 4. Masih banyaknya sarana Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Rusak
 5. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau
 6. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan serta tingginya biaya personal siswa
 7. Terbatasnya Anggaran Daerah
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.



1. Melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun 2025 Unit Sekolah Baru (USB) SMA 1 Unit, SMK 0 Unit dan SLB 1 Unit. Pembangunan RKB SMA 64 Ruang, SMK 12 Ruang dan SLB 0 Ruang. Pengadaan Mebel SMA 36 Paket dan SMK 20 Paket, SLB 9 Paket. Tahun 2026 Pembangunan RKB SMA 5 Ruang dan SMK 8 Ruang, Pengadaan Mebel SMA 14 Paket, SMK 6 Paket.
2. Melakukan rehabilitasi infrastruktur bangunan sekolah, Tahun 2025 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 38 Ruang SMK 14 Ruang. Tahun 2026 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 1 Ruang, SMK 3 Ruang.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan sekolah jarak jauh (SMA Terbuka). Pelaksanaan SMA Terbuka (SMATER) Tahun 2024/2025 memiliki 63 TKB dan 1.664 Siswa.
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran.
5. Dinas Pendidikan Provinsi Riau meningkatkan upaya dalam meningkatkan Anggaran yang bersumber dari APBN
6. Meningkatkan ketersediaan data Pendidikan yang akurat dan berkualitas
7. Pemenuhan Pembiayaan Operasional Sekolah melalui BOSDA. Total dana BOSDA tahun 2025 Rp.269.822.325.000 dengan rincian sebagai berikut: SMA Negeri Rp. 161.410.925.000, SMA Swasta Rp. 10.015.600.000, SMK Negeri Rp. 76.997.880.000, SMK Swasta Rp. 15.230.000.000, SLB Negeri Rp. 4.941.720.000, SLB Swasta Rp. 1.226.200.000. Adapun siswa penerima BOSDA berjumlah sebanyak: SMA Negeri 153.118 siswa dan SMA Swasta 24.585 siswa dengan total 177.703 siswa. SMK Negeri 70.430 siswa dan SMK Swasta 35.381 siswa dengan total 105.811 siswa. SLB Negeri 1.944 siswa dan SLB Swasta 2.509 siswa dengan total 4.453 siswa.
8. Memberikan Bantuan kepada siswa Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan personel yang mendukung berpartisipasinya siswa dalam pendidikan. Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2025 sebanyak 4.785 siswa. BSM dan BS KAT Tahun 2026 sebanyak 4.642 Siswa BSM KAT dan BS KAT. Pemberian Bantuan Beasiswa bagi anak-anak Masyarakat

Terpencil (KAT) tahun 2025 sebanyak 137 siswa. Bantuan KAT tahun 2026 sebanyak 143 siswa.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Akses Pendidikan dan indikator APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses Pendidikan	APK SM Sederajat	93,70	86,79	6,91
	APM SM Sederajat	94,71		7,91

Dari tabel 3.24 di atas terlihat bahwa Berdasarkan Tabel 3.20, capaian indikator APK dan APM SM Sederajat masing-masing sebesar 93,70% dan 94,71%, dengan tingkat penyerapan anggaran 86,79%. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 6,91% dan 7,91%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian kinerja relatif optimal meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal, sehingga penggunaan sumber daya dapat dikategorikan efisien, Tidak terserapnya sebagian anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS (BOSDA) disebabkan oleh adanya tunda bayar Tahun 2024 yang belum dapat dicairkan karena menunggu hasil pemeriksaan APIP, serta sisa setoran belanja sekolah yang tidak digunakan dan telah dikembalikan ke kas daerah. Kondisi ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian keuangan yang baik, meskipun berdampak pada tingkat penyerapan anggaran. Kendala bersifat administratif, bukan kegagalan program, tidak terdapat indikasi inefisiensi substantif dan Perlu perbaikan timeline pemeriksaan dan perencanaan belanja.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:



- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

Dampak Kinerja terhadap Masyarakat untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan, Meskipun terjadi penurunan realisasi APK dan APM akibat peningkatan jumlah penduduk usia sekolah, dampak kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan terhadap masyarakat tetap positif. Layanan pendidikan menengah tetap tersedia dan jumlah peserta didik relatif stabil. Penurunan indikator lebih bersifat statistik demografis dan tidak mencerminkan penurunan kualitas maupun komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

3. SASARAN 3 : MENINGKATNYA MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tahun 2025 dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A. Capaian sasaran indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A

Indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A dapat digunakan untuk ketercapaian sasaran meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah SMA dan SMK yang berakreditasi A}}{\text{Jumlah Seluruh SMA dan SMK}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	45	46,47	103,27	44,98	44,65	99,27

Dari tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2025 mencapai 46,47% dari target 45,00% atau sebesar 103,27%. Capaian ini meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 44,65%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui penguatan pembinaan, pendampingan akreditasi, serta implementasi sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan. Berikut tabel realisasi indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2025:

Tabel 3.28
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SMA DAN SMK	JUMLAH SMA SMK YANG BERAKREDITASI A	PERSENTASE SMA DAN SMK YANG BERAKREDITASI A
1	Kab. Bengkalis	84	43	51,19
2	Kab. Indragiri Hilir	65	20	30,77
3	Kab. Indragiri Hulu	49	16	32,65
4	Kab. Kampar	92	46	50,00
5	Kab. Kepulauan Meranti	36	9	25,00
6	Kab. Kuantan Singingi	36	23	63,89
7	Kab. Pelalawan	50	23	46,00
8	Kab. Rokan Hilir	89	32	35,96
9	Kab. Rokan Hulu	79	29	36,71
10	Kab. Siak	68	35	51,47
11	Kota Dumai	39	17	43,59
12	Kota Pekanbaru	148	95	64,19
	TOTAL	835	388	46,47

Sumber data : Buku APK APM Kemendikbudristek

Dari tabel 3.26 tersebut Sebaran SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun 2025 menunjukkan capaian provinsi sebesar 46,47%. Meskipun telah melampaui target, terdapat disparitas antarwilayah dengan rentang **persentase** antara 25,00% hingga 64,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan telah berjalan baik namun masih memerlukan penguatan intervensi afirmatif pada wilayah dengan persentase rendah guna mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Analisis Komprehensifnya sebagai berikut:

1. Wilayah dengan Persentase Tertinggi adalah Kota Pekanbaru: 64,19%, Kab. Kuantan Singingi: 63,89%, Kab. Siak: 51,47%, Kab. Bengkalis: 51,19% dan Kab. Kampar: 50,00%. Karakteristik umum Akses sarana prasarana relatif baik, Ketersediaan guru lebih memadai, Dukungan pembinaan dan supervisi lebih intensif dan Akses informasi dan pendampingan akreditasi lebih mudah. Khusus Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan menunjukkan konsentrasi mutu yang tinggi.
2. Wilayah dengan Persentase Sedang (40–49%) adalah Kab. Pelalawan: 46,00% dan Kota Dumai: 43,59%. Wilayah ini menunjukkan potensi peningkatan karena selisih menuju 50% relatif kecil.

3. Wilayah dengan Persentase Rendah (<40%) adalah Kab. Kepulauan Meranti: 25,00%, Kab. Indragiri Hilir: 30,77%, Kab. Indragiri Hulu: 32,65%, Kab. Rokan Hilir: 35,96% dan Kab. Rokan Hulu: 36,71%. Karakteristik umum: Tantangan geografis (kepulauan/akses sulit), Keterbatasan sarana prasarana, Distribusi guru belum merata dan Keterbatasan pembinaan berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini
Dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	45	46,47	103,27	43,48	46,47	106,88

Dari tabel 3.27 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase SMA dan SMK yang Berakreditasi A Tahun 2025 sebesar 46,47% telah melampaui target tahunan 45,00% dengan capaian 103,27%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 43,48%, capaian telah mencapai 106,88%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan berjalan sangat baik dan melebihi proyeksi perencanaan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A sasaran Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan kelembagaan atau satuan pendidikan



- oleh Pengawas Pendidikan
- b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau
1. Adanya Penambahan Sekolah baru berdiri belum dapat diakreditasi dan belum memenuhi syarat
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam meningkatkan mutu guru dan siswa yang masih kurang
 3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
 4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan Pendidikan.
 5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM.
 6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang.
 7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang.
 8. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi guru
 9. Masih kurangnya kualitas/lulusan siswa
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
1. Meningkatkan sarana prasarana dan utilitas sekolah dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kepada para siswa dengan membangun dan merehabilitasi Ruang Laboratorium IPA (Fisika, Kimia dan Biologi) dan meubiler dan alat praktek dan peraga, pembangunan asrama sekolah, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah,
 2. Meningkatkan sinergi BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan dan meningkatkan kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan melalui Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (pelatihan, Inhouse training, dan peningkatan pendidikan)

4. Meningkatkan kualitas/lulusan siswa melalui Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik dan Pembinaan bakat dan kreativitas Siswa.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	103,27	88,88	14,39

Dari tabel 3.23 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator Persentasi SMA dan SMK yang berakreditasi A sebesar 103,27% dapat tercapai dengan serapan anggaran 88,88% dengan tingkat efisiensi mencapai 14,39%. Adapun analisis efisiensi serapan anggaran tahun 2025 dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - Pembangunan Asrama Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah



- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
- Pembinaan bakat dan kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
- Pembangunan Ruang Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
- Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) pada sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Praktik Siswa
- Pembangunan Ruang Laboratorium
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Asrama Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan



- Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah

c. Pengelolaan Pendidikan Khusus pada sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Asrama Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Dampak kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan terhadap masyarakat adalah meningkatnya kualitas/mutu pendidikan di sekolah yang telah berkreditasi A. Dimana masyarakat/siswa akan merasakan dan memanfaatkan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas guru yang sangat baik dan peluang masyarakat/siswa yang lulus berprestasi dapat kuliah melalui jalur eligible (SNBP) dan meningkatnya masyarakat/siswa yang melanjutkan pendidikan melalui SNBT maupun jalur mandiri dan Sekolah Kejuruan bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri baik pemagangan dan penerimaan tenaga kerja serta Lulusan siswa Kejuruan dapat diterima bekerja dengan kompetensi yang mumpuni maupun membuka usaha sendiri.

4. SASARAN 4 : MENINGKATNYA NILAI SAKIP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Capaian sasaran indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inpektorat Provinsi Riau.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80	74,85	100,07	74,50	74,60	100,13

Dari tabel 3.28 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 mencapai 74,85 dari target 74,80 atau sebesar 100,07%. Capaian ini meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 74,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi telah berjalan secara konsisten dan mengalami penguatan dari sisi perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja. Meskipun peningkatan bersifat gradual, stabilitas capaian mencerminkan tata kelola yang semakin baik. Berikut tabel realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Tahun 2025:

Tabel 3.32
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tabel 3.33
Realisasi Capaian Nilai SAKIP
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	72,33	73,25	74,60	74,80	74,85

Dari tabel 3.30 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 72,33 pada Tahun 2021 menjadi 74,85 pada Tahun 2025. Peningkatan sebesar 2,52 poin dalam lima tahun mencerminkan penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan. Meskipun kenaikan dalam dua tahun terakhir bersifat gradual, stabilitas capaian menunjukkan bahwa tata kelola kinerja telah berada pada kondisi yang baik dan matang.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini
Dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80	74,85	100,07	74,50	74,85	100,47

Dari tabel 3.31 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 mencapai 74,85 atau 100,07% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 74,50, capaian telah mencapai 100,47%, sehingga target akhir Renstra telah terlampaui. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan secara konsisten dan efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, Hal tersebut ditunjukkan dengan telah tersedianya dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar, namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- 1) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading);
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil



yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah memiliki pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja, menjelaskan definisi operasional atas kinerja dan memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja. Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga telah mengupload dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu dengan Indikator Kinerja yang menggambarkan outcome yang nyata bagi masyarakat. Pengumpulan dokumen perencanaan dan penginputan data capaian indikator sudah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi siapadia.riau.go.id. Namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja dan setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- 2) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dan analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;
- 3) Belum menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja belum optimal sehingga sistem informasi manajemen kinerja yang ada belum mendukung pemantauan real-time;
- 5) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta dalam penyesuaian (refocusing) organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas



kinerja Tahun 2024, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) belum menyertakan data pendukung dan bukti capaian secara sistematis (evidence-based);
- 2) Informasi dalam laporan kinerja belum berpengaruh terhadap budaya organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah memiliki pedoman teknis evaluasi SAKIP namun pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu belum dilakukannya secara berjenjang pada seluruh bidang/sub bidang dan evaluasi kinerja internal dilakukan secara berkala yang mana hasil evaluasi internal digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau rencana aksi..

2. Rekomendasi

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading).
- Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).
- Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline.
- Melaksanakan monitoring kinerja terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang di perjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit

kerja (Bagian/Subbagain) Laporan monev per triwulan memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;

- Meningkatkan kualitas Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja di periode berikutnya;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.35

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	100,07	97,23	2,84

Dari tabel 3.33 di atas terlihat bahwa Capaian kinerja Nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 100,07% dengan tingkat penyerapan anggaran 97,23%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2,84%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis dapat



dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat, mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp 2.889.550.954.820 atau 92,43% dari pagu anggaran sebesar Rp 3.126.199.465.851. Sisa pagu anggaran sebesar Rp 236.648.511.031 terutama disebabkan oleh tunda bayar Tahun 2024 yang masih menunggu hasil pemeriksaan APIP serta sisa setoran sekolah pada sub kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS SMA, SMK, dan Sekolah Pendidikan Khusus. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan. Sisa anggaran disebabkan faktor administratif dan pengendalian internal, Tidak berdampak pada capaian kinerja strategis dan Tata kelola keuangan berjalan akuntabel dan prudent. Berikut adalah Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran:

Tabel 3.36
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (RP)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	1	Rata-Rata Lama Sekolah	9,48-9,42	9,55	100,74	1.212.039.338.842	1.028.505.083.266	84,86
	2	Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54	13,44	99,93			
Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	92,45	86,63	93,7 0	1.094.880.815.305	924.375.672.540	84,43
	2	APM SM Sederajat	68,20	64,59	94,71			
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan		Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	45	46,47	103,27	117.158.523.537	104.129.410.726	88,88
Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80	74,85	100,07	1.914.160.127.009	1.861.045.871.554	97,23

Dari tabel 3.34 di atas terlihat bahwa Sasaran Strategis sesuai Perjanjian Kinerja Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah yang merupakan Indikator Kinerja Gubernur Riau Bidang Pendidikan maka di dukung oleh Seluruh Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan Pagu Anggaran Rp.1.212.039.338.842 dan realisasi sebesar Rp.1.028.505.083.266. Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan Indikator Kinerja APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat di dukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan yang dapat meningkatkan akses pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan Pagu Anggaran Rp1.094.880.815.305 dan realisasi sebesar Rp.924.375.672.540. Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan Indikator Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A di dukung oleh



Program Pengelolaan Pendidikan yang dapat meningkatkan Mutu, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Pagu Anggaran Rp.117.158.523.537 dan realisasi sebesar Rp104.129.410.726. Sasaran Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau di dukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pagu Anggaran Rp.1.914.160.127.009 dan realisasi sebesar Rp.1.861.045.871.554.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	1 Rata-Rata Lama Sekolah	9,48-9,42	9,55	100,74
	2 Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54	13,44	99,93
Meningkatnya Akses Pendidikan	1 APK SM Sederajat	92,45	86,63	93,70
	2 APM SM Sederajat	68,20	64,59	94,71
Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	45	46,47	103,27
Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80	74,85	100,07

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2025 yang diukur berdasarkan sasaran strategis yang telah dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata dengan indikator RLS dan HLS telah mencapai target 100,74 dan 99,93 persen pada tahun 2025.



2. Meningkatnya Akses Pendidikan dengan indikator APK SM Sederajat dan APM SM sederajat telah mencapai target 93,70 dan 94,71.
3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A telah mencapai target 103,27 persen.
4. Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mencapai target 100,07.

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang yaitu

1. Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan melalui Kebijakan membangun USB dan RKB dan Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas.
2. Untuk Meningkatkan Aksebilitas Layanan Pendidikan Melalui Kebijakan Pemenuhan operasional Sekolah dan Pendirian layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka).
3. Untuk Peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Melalui Kebijakan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi, Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas Pendidikan melalui kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan layanan khusus.
5. Untuk meningkatkan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui kebijakan Meningkatkan kerjasama pendidikan kejuruan dengan DUDI, Meningkatkan manajemen sekolah berbasis vokasi dan Meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan DUDI.



PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. ERISMAN YAHYA, M.H**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **ABDUL WAHID**

Jabatan : **GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 22 September 2025

Pihak Kedua
GUBERNUR RIAU


ABDUL WAHID

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau


H. ERISMAN YAHYA, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU


No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	1. Rata- Rata Lama Sekolah	9,42-9,48
		2. Harapan Lama Sekolah	13,45-13,54
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat (persen)	68,20
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat (persen)	92,45
3	Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Berakreditasi A (Persen)	45,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74,80

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	1.362.015.189.404,00	
2. Program Pengembangan Kurikulum	Rp	158.163.325,00	
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	16.564.704.092,00	
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	1.658.300.304.491,00	
Total	Rp	3.037.038.361.312,00	

Pekanbaru, 22 September 2025

GUBERNUR RIAU,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU


ABDUL WAHID


H. ERISMAN YAHYA, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%	94,90%	97,24%	1.914.160.127.009	1.861.045.871.554	97,23%
	Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan							
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	3.450.930.880,00	1.609.367.117,00	46,64%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	1.799.598.980,00	521.399.409	28,97%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	1.651.331.900,00	1.087.967.708,00	65,88%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	157,00%	109,90%	1.878.326.678.979,00	1.844.729.776.704,00	98,21%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.697 Orang	17.251 Orang	109,90%	1.878.326.678.979	1.844.729.776.704	98,21%
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100,00%	100,00%	100,00%	121.028.126,00	108.641.915,00	89,77%
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	121.028.126,00	108.641.915,00	89,77%
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	68,03%	3.695.064.372,00	2.023.741.879,00	54,77%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	100,00%	89.246.065,00	0,00	0,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Paket	17 Paket	48,57%	1.228.217.553,00	585.511.520,00	47,67%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300 Paket	845 Paket	65,00%	249.996.000,00	119.467.800	47,79%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	6 Paket	35,29%	774.839.954,00	592.461.180,00	76,46%
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460 Laporan	420 Laporan	91,30%	1.352.764.800,00	726.301.379,00	53,69%
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100,00%	971.750.927,00	143.862.500,00	14,80%
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26 Unit	26 Unit	100,00%	971.750.927,00	143.862.500,00	14,80%
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani	404 Orang	404 Orang	100,00%	20.936.101.025,00	10.714.020.707,00	51,17%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	2.897.060.424,00	1.817.382.109,00	62,73%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220 Laporan	220 Laporan	100,00%	18.039.040.601,00	8.896.638.598,00	49,32%
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100,00%	100,00%	3.136.652.700,00	1.022.769.591,00	32,61%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	16 Unit	94,12%	268.360.000,00	174.143.511,00	64,89%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	14 Unit	82,35%	375.050.000,00	170.202.680,00	45,38%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	22 Unit	48,89%	254.330.000,00	122.100.000,00	48,01%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100,00%	2.238.912.700,00	556.323.400,00	24,85%
	8	Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	100 Persen	100,00%	3.521.920.000	693.691.141	19,70%
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21 Unit Kerja	21 Unit Kerja	100,00%	3.521.920.000,00	693.691.141	19,70%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		58,92%	74,03%	163,30%	1.194.020.604.131,00	1.011.631.347.725,20	84,72%
	indikator :							
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas		20,37%	56,75%	278,60%			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun		77,40%	77,42%	100,03%			
	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B		79,00%	87,92%	111,29%			
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82,45%	90,80%	110,13%	645.671.489.823	534.561.632.475	82,79%
	Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi minimal B							
	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2 Unit	0 Unit	0,00%	723.175.347,00	660.813.360,00	91,38%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Unit	0 Unit	0,00%	1.051.631.961,00	1.036.505.577,00	98,56%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	0 Ruang	0,00%	42.044.745,00	42.044.745,00	100,00%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 Ruang	0 Ruang	0,00%	70.707.077,00	55.844.040,00	78,98%
	5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	0 Ruang	0,00%	1.057.101.457,00	986.294.290,00	93,30%
	6	Pembangunan Asrama Sekolah	1 Unit	1 Unit	100,00%	1.536.562.270,00	1.530.158.518,00	99,58%
	7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23 Unit	28 Unit	121,74%	13.811.954.428,00	13.040.787.163,00	94,42%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	47 Ruang	38 Ruang	80,85%	9.636.041.171,00	9.404.179.541,00	97,59%
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	713.387.882,00	713.387.882,00	100,00%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	193.800.680,00	191.322.532,00	98,72%
	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	5 Ruang	2 Ruang	40,00%	1.139.284.780,00	1.083.089.666,00	95,07%
	12	Pengadaan Mebel Sekolah	36 Paket	36 Paket	100,00%	14.547.537.460,00	11.019.935.880,00	75,75%
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Paket	1 Paket	25,00%	3.178.848.250,00	3.144.958.672,00	98,93%
	14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	78 Paket	64 Paket	82,05%	7.583.152.000,00	1.364.596.500,00	18,00%
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4800 Peserta Didik	4785 Peserta Didik	99,69%	5.207.696.322,00	5.051.510.122,00	97,00%
	16	Pembinaan Bakat dan Kreativitas Siswa	159 Peserta Didik	174 Peserta Didik	109,43%	2.355.518.829,00	2.093.421.739,00	88,87%
	17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	233 Orang	233 Orang	100,00%	3.196.324.184,00	2.504.579.109,00	78,36%
	18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	475 Satuan Pendidikan	475 Satuan Pendidikan	100,00%	1.913.542.865,00	1.754.799.443,00	91,70%
	19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	475 Satuan Pendidikan	475 Satuan Pendidikan	100,00%	280.497.324.000,00	277.832.760.224	99,05%
	20	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	475 Orang	475 Orang	100,00%	217.964.799.184,00	125.943.154.760,00	57,78%
	21	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	60 Orang	100,00%	31.051.000,00	20.572.400,00	66,25%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	22	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4 Unit	0 Unit	0,00%	104.926.685,00	34.105.500,00	32,50%
	23	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Unit	2 Unit	100,00%	605.559.805,00	589.747.955,00	97,39%
	24	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	1 Unit	3 Unit	300,00%	7.499.725.429,00	7.443.261.501,00	99,25%
	25	Pembangunan Ruang Laboratorium	13 Ruang	3 Ruang	23,08%	1.566.489.694,00	1.512.218.959,00	96,54%
	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	1 Unit	0 Unit	0,00%	1.713.647.230,00	1.685.455.781,00	
	27	Pembangunan Ruang Kelas Baru	51 Ruang	64 Ruang	125,49%	28.966.474.351,00	28.618.672.824,00	98,80%
	28	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	0 Unit	0,00%	218.236.328,00	218.236.328	100,00%
	28	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	459 Satuan Pendidikan	459 Satuan Pendidikan	100,00%	38.544.944.409,00	34.985.217.464,00	90,76%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88,46%	88,37%	99,90%	501.437.472.974	433.141.118.416	86,38%
		Indikator : Persentase SMK yang berkreditasi						
	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	841.710.000,00	793.769.769,00	94,30%
	2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	10.017.047.332,00	9.626.680.135,00	96,10%
	3	Pembangunan RuangLaboratorium	2 Ruang	2 Ruang	100,00%	1.413.519.000,00	1.324.781.531,00	93,72%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	576.066.500,00	544.030.342,00	94,44%
	5	Pembangunan Asrama Sekolah	2 Unit	2 Unit	100,00%	1.542.292.000,00	1.496.591.211,00	97,04%
	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 Unit	19 Unit	86,36%	13.906.549.000,00	5.410.662.243,00	38,91%
	7	Pengadaan Mebel Sekolah	20 Paket	20 Paket	100,00%	9.696.191.100,00	9.560.135.998,00	98,60%
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	71 Paket	72 Paket	101,41%	140.650.136.990,00	131.466.958.881,00	93,47%
	9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	120 Peserta Didik	120 Peserta Didik	100,00%	1.179.151.295,00	662.965.848,00	56,22%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	140 Orang	140 Orang	100,00%	779.338.422,00	167.250.000,00	21,46%
	11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	307 Satuan Pendidikan	307 Satuan Pendidikan	100,00%	401.914.226,00	220.615.000,00	54,89%
	12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	307 Satuan Pendidikan	307 Satuan Pendidikan	100,00%	174.147.610.000,00	171.706.648.877	98,60%
	13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	307 Orang	307 Orang	100,00%	109.012.471.350,00	68.486.339.237	62,82%
	14	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	3 Unit	100,00%	3.624.356.500,00	1.555.978.948,00	42,93%
	15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	21 Ruang	21 Ruang	100,00%	9.595.738.000,00	9.293.546.413,00	96,85%
	16	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 Unit	1 Unit	50,00%	795.069.000,00	770.919.145,00	96,96%
	17	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	14 Ruang	14 Ruang	100,00%	6.432.797.646,00	5.776.416.733,00	89,80%
	18	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	1 Unit	1 Unit	100,00%	2.146.107.410,00	2.028.935.281,00	94,54%
	19	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	100,00%	14.679.407.203,00	12.247.892.824,00	83,44%
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator : Persentase Sekolah Pendidikan Khusus yang terakreditasi minimal B	58,04%	71,42%	123,05%	46.911.641.334,00	43.928.596.834,20	93,64%
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 Unit	1 Unit	100,00%	4.541.067.605,00	4.457.079.115,00	98,15%
	2	Pembangunan Asrama Sekolah	0 Unit	0 Unit	0,00%	766.521.809,00	766.521.808,20	100,00%
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Unit	3 Unit	150,00%	5.186.866.803,00	5.063.252.332,00	97,62%
	4	Pengadaan Mebel Sekolah	11 Paket	9 Paket	81,82%	1.478.331.494,00	1.472.408.092,00	99,60%
	5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	7 Paket	7 Paket	100,00%	784.515.067,00	753.419.080,00	96,04%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator : Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	70 Poin	70 Poin	100,00%	13.303.610.898,00	12.916.328.179,00	97,09%
1.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	75 Sekolah	75 Sekolah	100,00%	13.303.610.898,00	12.916.328.179,00	97,09%
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	13.172.104.580,00	12.800.627.479,00	97,18%
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	131.506.318,00	115.700.700	87,98%
CABANG DINAS WILAYAH I					1.329.382.305,00	1.259.537.601,95	94,75
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100%	100%	95,33%	392.469.850,00	369.986.546,95	94,27%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	97.328.386,00	93.722.504,00	96,30%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100,00%	29.702.514,00	28.609.974	96,32%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	100 Paket	100,00%	16.042.000,00	13.790.000	85,96%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket	100,00%	6.313.872,00	6.130.530	97,10%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	45.270.000,00	45.192.000	99,83%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani	404 Orang	404 Orang	100,00%	213.108.664,00	195.490.766,95	91,73%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	29.965.000,00	28.712.280,00	95,82%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	183.143.664,00	166.778.486,95	91,06%
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	100%	100,00%	82.032.800,00	80.773.276,00	98,46%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	32.032.800,00	30.773.276,00	96,07%
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	II	PROGRAM PENGELOLAAN PEDIDIKAN Indikator 1 : Angka Partisipasi Sekoian (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Indikator 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Indikator 3 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang	20,37 APS 77,40 APS 79,00 persen	56,75 APS 77,42 APS 87,92 persen	278,59% 100,02 % 111,29 %	936.912.455,00	889.551.055,00	94,94%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82,54%	90,80%	110,01%	468.936.021,00	466.536.021,00	99,49%
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	463.486.021,00	463.486.021	100,00%
	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	100,00%	5.450.000,00	3.050.000	55,96%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi minimal B	88,46%	88,37%	99,90%	467.976.434,00	423.015.034,00	90,39%
	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	100,00%	5.034.000,00	3.407.000	67,68%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	462.942.434,00	419.608.034	90,64%
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II						510.639.050,00	316.511.203,00	61,98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN) Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan		100%	91,67%	91,67%	366.662.788,00	316.511.203,00	86,32%
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75,00%	95.123.008,00	78.013.635,00	82,01%
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100,00%	29.736.628,00	29.509.885	99,24%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	0 Paket	0,00%	16.148.000,00	0	0,00%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket	100,00%	6.343.380,00	6.271.500	98,87%
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	100,00%	42.895.000,00	42.232.250	98,45%
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404 Orang	404 Orang	100,00%	239.270.656,00	206.498.474,00	86,30%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	50.998.656,00	46.519.226,00	91,22%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	188.272.000,00	159.979.248,00	84,97%
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	32.269.124,00	31.999.094,00	99,16%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	32.269.124,00	31.999.094,00	99,16%
Program Pengelolaan Pendidikan								

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
2	Indikator 1 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	20,37 APS	56,75 APS	278,59%	143.976.262,00	-	0,00%
	Indikator 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun	77,40 APS	77,42 APS	100,02 %			
	Indikator 3 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	79,00 persen	87,92 persen	111,29 %			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82,45%	90,80%	110,13%	68.828.543,00	-	0,00%
	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300 Orang	0 Orang	0,00%	48.340.066,00		0,00%
	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	220 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00%	20.488.477,00		0,00%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88,46%	88,37%	99,90%	75.147.719,00	-	0,00%
	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300 Orang	0 Orang (0%)	0,00%	56.049.719,00	-	0,00%
	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	220 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan (0%)	0,00%	19.098.000,00		0,00%
CABANG DINAS WILAYAH III					1.617.253.586,00	1.456.045.271,00	90,03
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN) Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100%	99,16%	99,16%	440.151.668,00	388.424.126,00	88,25%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	97.990.268,00	68.397.871,00	69,80%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100,00%	29.614.334,00	24.400.999	82,40%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	90 Paket	90,00%	16.100.000,00	4.045.000	25,12%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket	100,00%	6.275.934,00	6.194.372	98,70%
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	46.000.000,00	33.757.500	73,39%
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404 Orang	404 Orang	100,00%	222.171.000,00	200.575.886,00	90,28%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	39.994.000,00	38.867.350	97,18%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	182.177.000,00	161.708.536	88,76%
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	119.990.400,00	119.450.369,00	99,55%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	29.990.400,00	29.450.369	98,20%
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	90.000.000,00	90.000.000	100,00%
	II	Program Pengelolaan Pendidikan Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B Indikator 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Indikator 3 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak	79,00 persen 20,37 APS 77,40 APS	87,92 persen 56,75 APS 77,42 APS	111,29 % 278,59% 100,02 %	1.177.101.918,00	1.067.621.145,00	90,70%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82,45%	90,80%	110,13%	562.298.795,00	498.260.531,00	88,61%
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	436.227.531,00	436.227.531	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	3.280.000,00	2.780.000	84,76%
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	55 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00%	65.350.000,00	16.155.000	24,72%
	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300 Orang	300 Orang	100,00%	52.971.264,00	43.098.000	81,36%
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	328 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00%	4.470.000,00	0,00	0,00%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88,46%	88,37%	99,90%	614.803.123,00	569.360.614,00	92,61%
	1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	55 Peserta Didik	50 Peserta Didik	90,91%	65.420.000,00	55.245.320	84,45%
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300 Orang	300 Orang	100,00%	71.779.329,00	42.821.500	59,66%
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	328 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00%	6.310.000,00	0,00	0,00%
	4	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0 Ruang	0 Ruang	0,00%	471.293.794,00	471.293.794	100,00%
CABANG DINAS WILAYAH IV						1.181.910.788,00	925.313.286,00	78,29
	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN) Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan	100 Persen	100 Persen	100,00%	386.255.315,00	320.389.147,00	82,95%
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	104.454.543,00	97.267.750,00	93,12%
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100,00%	24.362.707,00	24.285.300	99,68%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	100 Paket	100,00%	9.660.000,00	3.082.000	31,90%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket	100,00%	8.996.836,00	8.824.200	98,08%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	61.435.000,00	61.076.250	99,42%
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404 Orang	404 Orang	100,00%	247.814.780,00	191.095.578,00	77,11%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	62.998.580,00	46.642.406	74,04%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	184.816.200,00	144.453.172,00	78,16%
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	33.985.992,00	32.025.819,00	94,23%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 Unit	100,00%	33.985.992,00	32.025.819,00	94,23%
	II	Program Pengelolaan Pendidikan indikator 1 : Angka Partisipasi Sekoian (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Indikator 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun Indikator 3 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B	20,37 APS 77,40 APS 79,00 persen	56,75 APS 77,42 APS 87,92 persen	278,59% 100,02 % 111,29 %	795.655.473	604.924.139	76,03%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82,45 Persen	90,80 Persen	110,13%	264.902.633	83.523.050	100,00%
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	0 Ruang	0,00%	38.845.950,00	30.812.000	79,32%
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	0 Ruang	0,00%	14.940.750,00	11.819.200	79,11%
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300 Orang	0 Orang	0,00%	176.303.131,00	12.236.250	6,94%
	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	156 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00%	19.872.052,00	16.890.000	84,99%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	1 Ruang	0 Ruang	0,00%	14.940.750,00	11.765.600	78,75%
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		88,46 persen	88,37 persen	99,90%	530.752.840	521.401.089	98,24%
	1	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1 Ruang	0 Ruang	0,00%	14.940.750,00	11.792.000	78,93%
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300 Orang	300 Orang	100,00%	171.345.604,00	167.948.854,00	98,02%
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	156 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00%	19.832.501,00	17.026.250	85,85%
	4	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	0 Ruang	0,00%	324.633.985,00	324.633.985	100,00%
JUMLAH						3.126.199.465.851,00	2.889.550.954.820,15	92,43